



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH ANGGARAN BELANJA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DAN PDRB PER KAPITA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
(Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)**

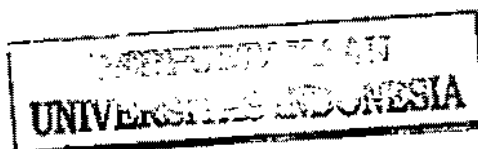
TESIS

I
25555

UJANG SYAHRUL M

0706192716

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JANUARI 2009**





UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGARUH ANGGARAN BELANJA BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT PENDAYAGUNAAN ZIS DAN PDRB PER KAPITA
TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
(Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)
dalam bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah
pada Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana UI

UJANG SYAHRUL M

0706192716

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
JANUARI 2009**

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Ujang Syahrul M

NPM : 0706192716

Tanda Tangan:

Tanggal : 5 Januari 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ujang Syahrul M
NPM : 0706192716
Program Studi : Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Pengaruh Anggaran Belanja Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Pendayagunaan Dana ZIS, dan
PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan
(Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Timur Tengah dan Islam, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Mustafa Edwin Nasution, Ph.D. (.....)

Pembimbing : Ranti Wiliasih, SP., M.Si. (.....)

Penguji : Dr. Muhammad Muslich, MBA. (.....)

Penguji : Handi Risza Idris, SE., M.Ec. (.....)

Pembaca Ahli : Nurul Huda, SE., MM., M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 8 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Scripta manent verba volant

Yang tertulis akan mengabadi, Yang terucap akan mengabur

Tiada kata terindah yang pantas diucapkan selain 'alhamdulillahirobbil'alamin'. Rasa syukur tiada pernah henti saya panjatkan kepada Allah. (Pernah terbersit keinginan untuk meninggalkan-Mu, tetapi kekaguman atas Rahmat-Mu menghalanginya). Sholawat serta salam saya sampaikan kepada Rasulullah SAW, teladan terbaik bagi seluruh manusia di sepanjang zaman.

Tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana keadaan dan pengaruh pengaruh anggaran belanja pemerintah DKI Jakarta bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Penulis yakin dengan sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari banyak pihak yang dengan begitu ikhlas telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia sekaligus pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Muslich, MBA., selaku ketua sidang yang telah banyak memberikan masukan berharga kepada penulis.
3. Ibu Ranti Wiliasih, SP., M.Si., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini.
4. Bapak Handi Risza Idris, SE., M.Ec., selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tesis ini.
5. Bapak Nurul Huda, SE., MM., M.Si. sebagai pembaca ahli.

6. Bapak Syamsuddin, terima kasih atas visi yang bapak tanamkan, dan Ibu Chotin, terima kasih atas doa yang tiada henti untukku.
7. Seluruh staff pengajar yang telah memberikan pencerahan dan pendewasaan melalui ilmu dan hikmah.
8. Seluruh staff administrasi PSTTI UI, Mas Hidayat, Mas Ferry, Mas Erwin, Mas Arasy, Mbak Desti, Mbak Tuti, Mbak Herlin, Mbak Yuli, Masteng, Mas Khoir.
9. Librarian Perpustakaan Pascasarjana UI, Mbak Sri, Mbak Fairuz, Mbak Tri, Mas Sukron.
10. Kakak-kakak beserta istri (mas Alex & mbak Titik, mas Iwan dan mbak Wiwin, mbak Nila dan mas Daman) dan adik-adikku (Asep dan Ais) yang telah memberikan dukungan, semangat dan selalu menjadi motivator.
11. Keponakanku: Ikmal, Nala, Didan, Dimas, dan Fitri. Kalian semua harus melebihi saya.
12. Untuk Amalia-ku, semoga Allah memberikan kenyataan yang indah untuk kita.
13. Seluruh teman-teman angkatan XIII (Tiga belas). Terutama untuk Witi, Omy, dan Zul, dengan apa aku harus membalas bantuanmu? Tanpa mereka entah sampai kapan tesisku bisa selesai.
14. Seluruh pihak terkait lainnya yang belum mungkin disebutkan satu per satu disini.

Penulis sadar sepenuhnya tesis ini masih jauh dari sempurna sehingga sangat mengharapkan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak dalam menyempurnakannya. Penulis sangat terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai tesis ini. Tesis ini dapat disalin oleh siapapun dengan atau tanpa seizin penulis dengan memperhatikan kaidah-kaidah akademik.

Kosan Salemba, Jakarta

Awal Januari 2008

Ujang Syahrul M

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ujang Syahrul M
NPM : 0706192716
Program Studi : Program Studi Timur Tengah dan Islam
Fakultas : Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

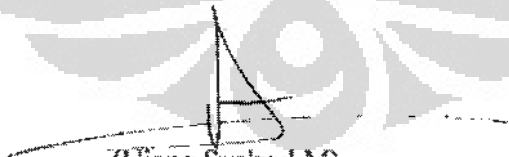
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Pengaruh Anggaran Belanja Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendayagunaan Dana ZIS, dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal 5 Januari 2008
Yang Menyatakan


(Ujang Syahrul M)

ABSTRAK

Nama : Ujang Syahrul M
Program Studi : Pusat Studi Timur Tengah dan Islam
Judul : Pengaruh Anggaran Pengeluaran Pemerintah, Pendayagunaan Dana ZIS, dan PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus DKI Jakarta Tahun 1987-2002)

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh anggaran pengeluaran pemerintah, Pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB perkapita terhadap tingkat kemiskinan. Setiap variabel dibentuk variabel manifestnya sehingga variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah di bidang kesra (perumahan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan), pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB Perkapita. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* mulai tahun 1987 sampai dengan 2002. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik dan BAZIS DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel anggaran pengeluaran pemerintah, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB Perkapita berhubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Artinya, ketika anggaran pengeluaran pemerintah, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB Per kapita meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun.

Kata Kunci :
anggaran pengeluaran pemerintah, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB Per kapita.

ABSTRACT

Name : Ujang Syahrul M
Study Program: Middle East and Islamic Study
Title : The Influence of Government Expenditure Budget, ZIS Utilization, and Per capita GRDP to the Poverty Level (Case Study in Jakarta Year 1987-2002)

This thesis is aimed to identify the influence of government expenditure budget and ZIS utilization toward the poverty level. The Variables used are government expenditure budget on people's welfare, ZIS utilization, and per capita GRDP. Each variable formed by its manifestation, so that the variables used in this research are government expenditure for housing, education and health, ZIS utilization, and per capita GRDP. The data which is used in this research are time series data, which is start from 1987 to 2002. The data source which used are from BPS (Statistics Indonesia) and BAZIS Jakarta. The method of analyzing data used is Multi Linear Regression. The result of this research shows that the government expenditure budget, ZIS utilization, and per capita GRDP have negative relation with the poverty level. It means that, when the amount of government expenditure budget, ZIS utilization, and per capita GRDP will increase, the poverty level will decrease.

Keywords:

Government Expenditure Budget, ZIS utilization, and per capita Gross Regional Domestic Product (GRDP).

تصوير تجريدي

أثر ميزانية مصاريف الحكومة واستخدام أموال الزكوات والإنفاق والصدقات على درجة الفقر
(بحث تحليلي في منطقة جاكرتا العاصمة فترة من سنة 1987 إلى 2002)

إعداد : أوجاع شهر الميرك

الكلية: الاقتصاد والمالية الإسلامية

الهدف من هذا البحث العلمي هو معرفة الأثر من ميزانية مصاريف الحكومة واستخدام أموال الزكوات والإنفاق والصدقات على درجة الفقر. المتغيرات المستخدمة هي ميزانية مصاريف الحكومة في مجال رفاة المجتمع واستخدام أموال الزكوات والإنفاق والصدقات والدخل الشخصي المنطقي ويعمل لكل متغير قائمة شحها حتى تصير المتغيرات المستخدمة هي مصاريف الحكومة في مجال السكن، والتربية والتعليم، واستخدام أموال الزكوات والإنفاق والصدقات والدخل الشخصي المنطقي. والبيانات في هذا البحث نستخرج من المكتب الإحصائي المركزي ولجنة عاملي الزكوات والصدقات في منطقة جاكرتا العاصمة. ومنهج البحث المستخدم في هذا البحث هو الإندثار الخطي المتعدد (multiple linear regression). ونتيجة البحث تشير إلى أن المتغيرات من ميزانية مصاريف الحكومة واستخدام أموال الزكوات والإنفاق والصدقات والدخل الشخصي المنطقي لها أثر سلبي على درجة الفقر حيث إنه في حالة ارتفاع ميزانية مصاريف الحكومة واستخدام أموال الزكوات والإنفاق والصدقات والدخل الشخصي المنطقي ستكون درجة الفقر تنخفض

الكلمات المهمة : ميزانية مصاريف الحكومة، واستخدام أموال الزكوات والإنفاق والصدقات،
والدخل الشخصي المنطقي

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mayoritas ulama dan ekonom muslim telah sepakat bahwa kewajiban zakat bukan hanya untuk memenuhi kepentingan ibadah, tetapi juga berguna bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan dana ZIS yang disalurkan kepada para mustahiq dapat membantu mereka ke luar dari kemiskinan.

Usaha pengentasan kemiskinan juga dapat ditempuh melalui pengelolaan anggaran pengeluaran pemerintah yang baik. Laporan Bank Dunia (2001) menyebutkan bahwa penyusunan anggaran pengeluaran pemerintah yang efisien sangat penting, karena kontribusinya yang besar dalam mengentaskan kemiskinan.

Setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Untuk belanja daerah dibagi atas dua bagian yakni belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga DKI Jakarta seperti pembayaran gaji pegawai, belanja barang, pembayaran angsuran hutang, belanja tak terduga dan lain-lain. Sebagian belanja pembangunan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat seperti belanja pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, pariwisata dan sebagainya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya juga mengalami peningkatan. Hal ini seharusnya ikut mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan.

Keadaan yang sama juga terjadi pada pendayagunaan dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. Nominal penyaluran dana ZIS selalu bertambah dari tahun ke tahun.

Melihat data-data, dimana angka pendayagunaan dana ZIS dan anggaran pengeluaran pemerintah serta pertumbuhan PDRB Perkapita terus mengalami kenaikan, seharusnya angka kemiskinan mengalami penurunan. Namun yang terjadi justru jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan.

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah anggaran pengeluaran dan pendayagunaan dana ZIS yang terus meningkat, pada saat yang sama jumlah penduduk miskin juga terus meningkat.

Merujuk pada permasalahan dalam penelitian ini, maka pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terkait dengan pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?

Jawaban dari pertanyaan penelitian ini diharapkan mencapai tujuan penelitian, yaitu : untuk Mengetahui pengaruh variabel anggaran pengeluaran pemerintah, pendayagunaan dana ZIS, PDRB Perkapita terhadap tingkat kemiskinan.

Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat, selain dari faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut sebagian kaum miskin itu sendiri, juga disebabkan karena tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang kaya. Salah satu alat untuk memutusnya adalah zakat yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak terjatuh dalam kemiskinan.

Penyusunan anggaran pengeluaran pemerintah yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi (Bank Dunia, 2001 dalam Widiastuti, 2008, p 45). Penelitian Alawi (2006) membuktikan bahwa pengeluaran daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dialokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. *Pertama*, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, pengeluaran untuk human capital investment. *Ketiga*, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial.

Pengurangan tingkat kemiskinan juga bisa ditempuh dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang semakin tinggi secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang dijelaskan di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

$H_0: \beta = 0$, tidak ada pengaruh belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan.

$H_1: \beta \neq 0$, ada pengaruh belanja bidang kesra pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan.

Teknik analisis penelitian ini adalah pertanyaan pertama dari penelitian ini dijawab dengan mendeskripsikan tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana pendayagunaan dana ZIS dan anggaran pengeluaran dialokasikan terhadap pengentasan kemiskinan. Pendekatan kualitatif deskriptif ini digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pertanyaan penelitian kedua dijawab melalui pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah alat analisis yang menggunakan model matematik, statistik, dan ekonometrika. Penggunaan metode kuantitatif-ekonometrika dilakukan untuk membuat model persamaan regresi dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TM = \alpha + \beta_1 \text{ KESRA} + \beta_2 \text{ ZIS} + \beta_3 \text{ PDRB} + \varepsilon_j$$

Dimana :

PM = Jumlah Penduduk Miskin

α = Intercept atau konstanta

$\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi

KESRA = Anggaran Belanja Bidang Kesejahteraan

ZIS = Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

ε_j = Standar error

Persamaan regresi penelitian ini akan dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Sementara pengolahannya dilakukan dengan menggunakan program Excel, SPSS, dan Eviews.

1. Performa anggaran bidang kesra mendapat perhatian yang cukup besar dari Pemda DKI Jakarta, dimana setiap tahunnya kecenderungan anggaran bidang kesra mengalami kenaikan yang cukup besar. Pendayagunaan dana ZIS untuk modal usaha produktif, membina pemanfaatan dana untuk meningkatkan usaha, dan mengurus pengembalian dana produktif. Kegiatan bidang bina usaha produktif telah menyalurkan dana kepada 1.553 orang dengan jumlah dana sebesar Rp. 1,9 milyar. Sementara tahun 2004 dan 2005 disalurkan kepada 19.458 orang dan 213 orang. Pada tahun 2002 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 15,13 persen yaitu dari Rp. 26,2 juta di tahun 2001 menjadi Rp. 30,2 juta rupiah di tahun 2002. Bila dihitung dengan menggunakan atas dasar harga konstan akan diketahui pertumbuhan PDRB per kapita secara riil. Pada tahun 2002 PDRB per kapita meningkat sebesar 3,86 persen yaitu dari 7,4 juta rupiah di tahun 2001 menjadi 7,7 juta rupiah di tahun 2002.
2. Anggaran belanja bidang kesra memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, ini dapat dilihat dari koefisien sloope yang bertanda negatif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi anggaran belanja bidang kesra akan menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian juga Pendayagunaan Dana ZIS memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, dengan koefisien sloope yang negatif berarti bahwa semakin besar pendayagunaan dana ZIS maka tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. Sedangkan variabel PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Beberapa saran berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar tetap mempertahankan performa anggaran bidang kesra yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dengan selalu menaikkan anggaran belanja khususnya

bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Pendayagunaan dana ZIS memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, maka anggaran pendayagunaan dana ZIS selalu ditingkatkan dan difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat miskin. PDRB memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB akan mengurangi tingkat kemiskinan, maka pemerintah daerah DKI diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah agar terjadi peningkatan PDRB.

2. Pemerintah DKI Jakarta agar membantu peningkatan peran serta BAZIS DKI Jakarta dalam peranannya membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

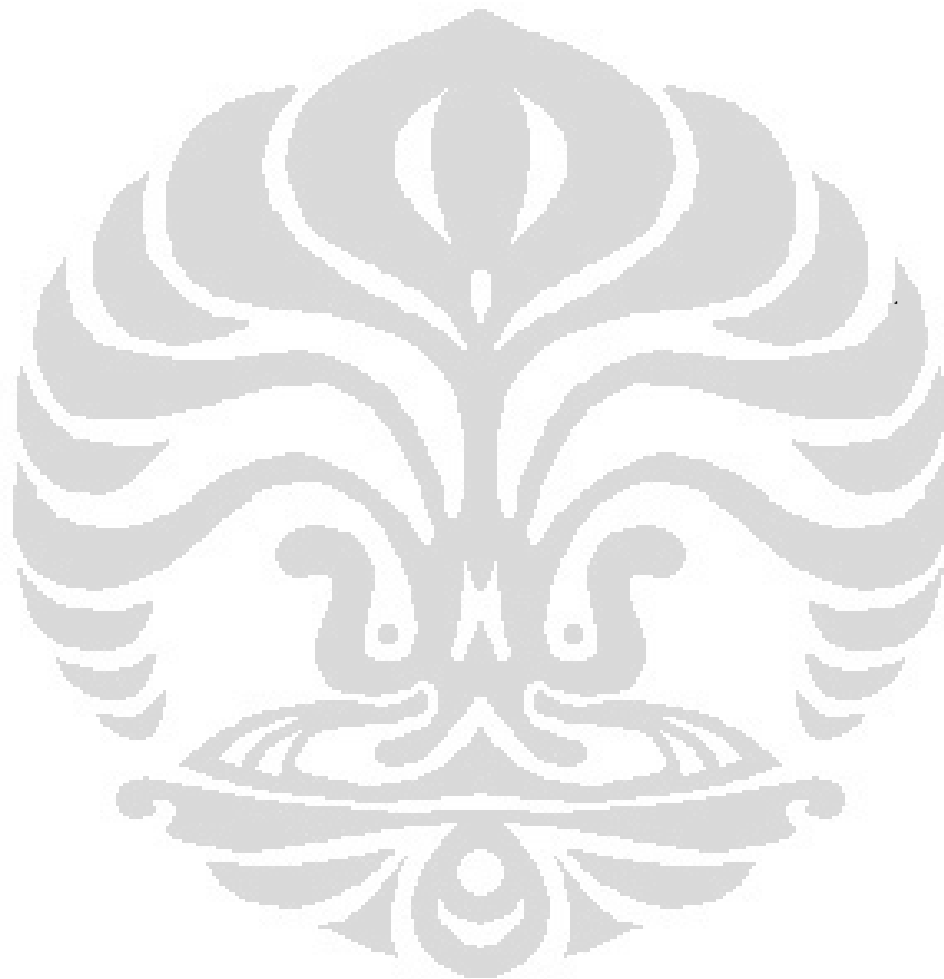


DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstrak dalam Bahasa Indonesia.....	vii
Abstrak dalam Bahasa Inggris.....	viii
Abstrak dalam Bahasa Arab.....	ix
Ringkasan eksekutif.....	x
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel.....	xviii
Daftar Gambar.....	xix
Daftar Lampiran.....	xx
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Batasan Masalah.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	8
1.6 Hipotesis Penelitian.....	9
1.7 Metode Penelitian.....	10
1.8 Sistematika Penulisan.....	11
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	14
2.1.1. Anggaran Belanja Pemerintah.....	14
2.1.2. Zakat Sebagai Alat Pengentasan Kemiskinan.....	21
2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita	22
2.1.4. Kemiskinan.....	23

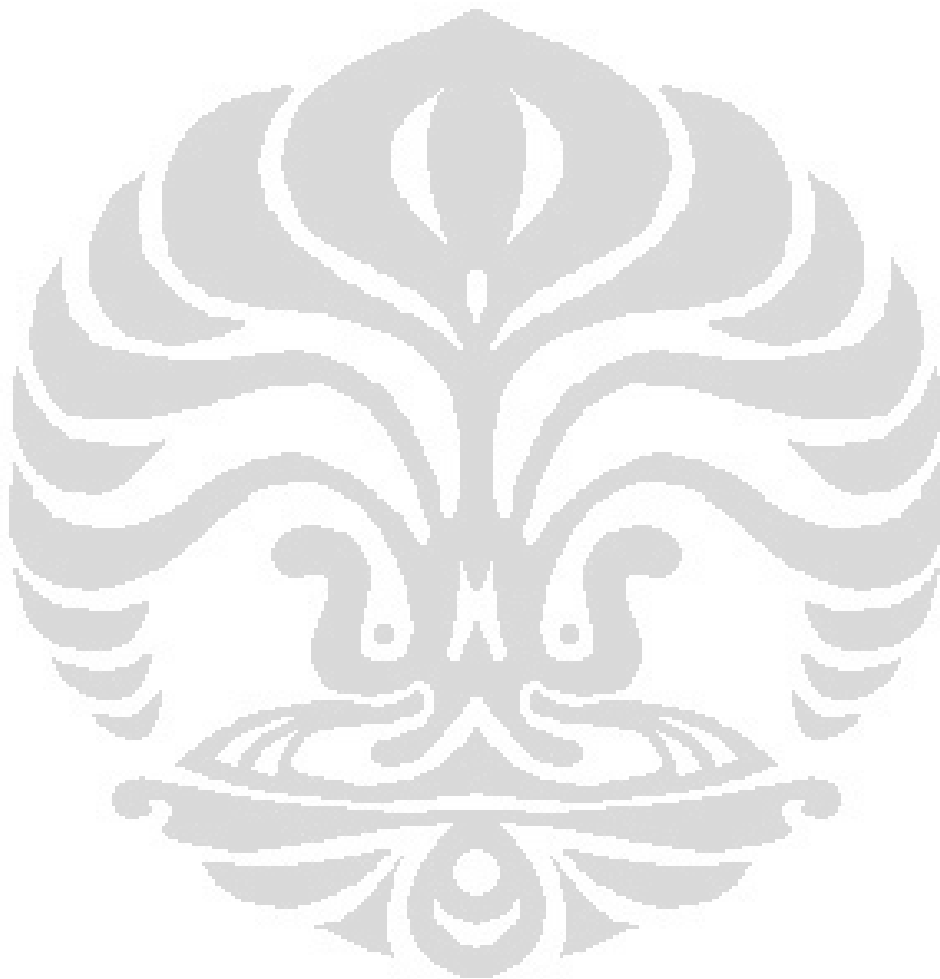
2.2 Penelitian-penelitian tentang Anggaran Belanja, Zakat, dan PDRB	29
2.3 Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah.....	36
3. METODOLOGI PENELITIAN DAN DATA	
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	39
3.1.1 Data yang digunakan.....	39
3.1.2 Variabel Penelitian	39
3.1.2 Deskripsi Data Penelitian.....	40
3.2 Metodologi untuk Pemecahan Masalah.....	41
3.2.1.Desain penelitian.....	41
3.2.2 Teknik Analisis.....	42
3.3 Pengujian Hipotesis.....	46
3.3.1 Uji-F (Uji model).....	48
3.3.2 Uji-t (Uji masing-masing variabel).....	48
3.4 Definisi Operasional	49
3.5 Deskripsi Objek Penelitian	49
3.4 Tahapan Penyelesaian Masalah.....	55
3.4 Flow Chart Tahap Penyelesaian Masalah.....	55
4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENYELESAIAN MASALAH	
4.1 Gambaran Anggaran Belanja Bidang KESRA, Pendayagunaan Dana ZIS, dan PDRB Per Kapita Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan .	58
4.1.1 Gambaran Anggaran Belanja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan	58
4.1.2 Gambaran Pendayagunaan Dana ZIS BAZIS DKI Jakarta Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan	61
4.1.3 Gambaran PDRB Per Kapita DKI Jakarta Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan.....	68
4.2 Analisis Kuantitatif Model Pengaruh Anggaran Belanja Bidang Kesra, Pendayagunaan Dana ZIS, PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	71
4.2.1 Estimasi Model.....	71

4.2.2 Pengujian Hipotesis.....	75
4.2.3 Interpretasi dan Analisis Model.....	77
5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Model Kerangka Pemikiran	9
Gambar 3.1.	Aturan membandingkan Uji DW dengan Tabel DW	47
Gambar 3.2.	Flow Chart Tahap Penyelesaian Masalah	56

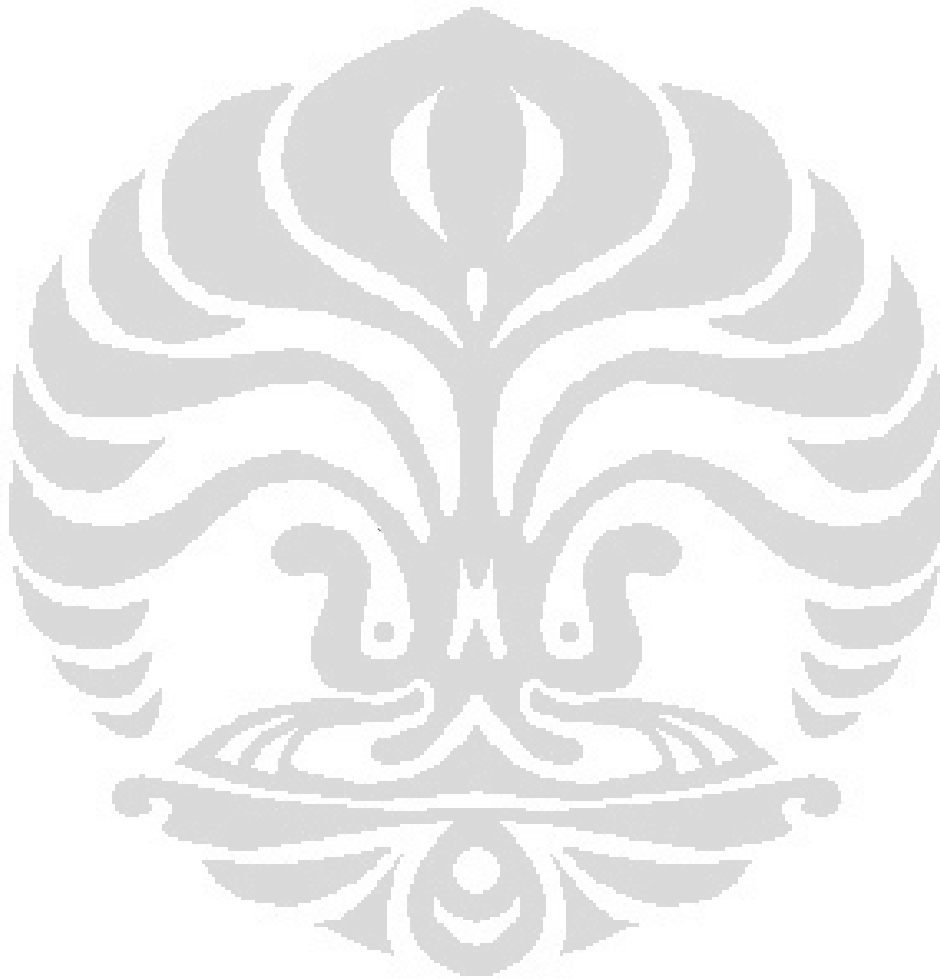


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Ikhtisar Penelitian-penelitian Sebelumnya.....	35
Tabel 3.1	<i>Mean, Median, Modus, Minimum, maximum, Standard Deviasi</i>	40
Tabel 3.2	Total Anggaran Belanja Bidang Kesra Tahun 1987-2002.	41
Tabel 4.1.	Realisasi Belanja Rutin Provinsi Dki Jakarta Tahun 2000-2002	59
Tabel 4.2.	Perbandingan Perubahan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan	60
Tabel 4.3.	Realisasi Pengeluaran Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2000-2002	62
Tabel 4.5	PDRB Per kapita atas Dasar Harga Konstan	68
Tabel 4.6	Total Kesra, PDRB per kapita, jumlah penduduk miskin..	70
Tabel 4.7	Estimasi Model Regresi Linear Berganda.....	72
Tabel 4.8.	Tes <i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM</i>	73
Tabel 4.9	White Heteroskedasticity Test	74
Tabel 4.10	Koefisien dan Konstanta Model	75
Tabel 4.11	Anggaran Belanja Bidang Kesra dan Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta	79
Tabel 4.12	Jumlah Dana ZIS dan Jumlah Penduduk Miskin.....	69
Tabel 4.13	PDRB per kapita, Gini Rasio, dan Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 1997 – 2006.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data-data Bahan untuk Regresi Linear Berganda	L-1
Lampiran 2	Estimasi Model Regresi Linear Berganda	L-2
Lampiran 3	Tes <i>White Heteroscedasticity</i>	L-3
Lampiran 4	Tes <i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM</i>	L-4
Lampiran 5	<i>Correlation Test</i>	L-5



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang sampai saat ini masih dihadapi oleh semua negara di dunia. Masalah kemiskinan biasanya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, dan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal ini menjadi penghambat bagi negara berkembang untuk menjadi negara maju.

Kemiskinan memiliki beberapa definisi. Salah satu definisi kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak memiliki tempat tinggal, orang sakit tidak memiliki biaya berobat ke dokter, anak-anak tidak mampu bersekolah, orang tidak memiliki pekerjaan, orang yang terpaksa tinggal dengan sanitasi buruk dan kesulitan mendapatkan air bersih.

Sachs (2005) menyatakan bahwa situasi kemiskinan ekstrem ditandai oleh tiadanya enam modal (*capital*): (1) *business capital*, (2) *human capital*, (3) *infrastructure capital*, (4) *natural capital*, (5) *knowledge capital*, dan (6) *public institutional capital*. Ketiadaan keenam modal inilah yang membuat orang miskin terperangkap dalam jebakan kemiskinan.

Kemiskinan memang memiliki implikasi yang sangat besar. Seseorang dapat kehilangan kebebasan bertindak karena kemiskinan. Ada banyak contoh kasus yang dapat dirujuk untuk menjelaskan keterkaitan antara keduanya, salah satunya adalah kasus seorang pedagang gorengan yang memilih gantung diri di rumah kontrakannya ataupun seorang anak SMP yang memilih mengakhiri hidupnya karena malu tidak bisa membayar biaya sekolah. Lebih jauh, kemiskinan juga mengakibatkan seseorang kehilangan keyakinannya, seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW, *kaada al-faqru an yakuuna kufran*, kemiskinan akan mendekatkan seseorang kepada kekufuran (Jamaludin, 2008).

Islam memiliki perhatian yang besar terhadap masalah kemiskinan. Fakir miskin mendapatkan prioritas utama dalam pembagian zakat.

Selain itu, masalah kemiskinan juga menjadi perhatian Al Quran dan hadits. Surat Adz-Dzariat (51) ayat 19 menyatakan :

وَبِأَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٠١﴾

Artinya :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam sangat memperhatikan penderitaan orang miskin. Dalam ayat lain, Allah memerintahkan kepada manusia untuk berdoa agar terhindar dari kemiskinan dan hidup selalu sejahtera di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 201 :

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka”.

Selain Al Quran, beberapa hadits Rasulullah juga menyinggung masalah kemiskinan. Seperti hadits berikut yang mengisyaratkan bahwa kemiskinan kedudukannya sama dengan kehinaan, kekurangan, dan kezaliman.

عن أبي هريرة أن رسول الله ص.م كان يقول : اللهم إني أعوذ بك من الفقر وأعوذ بك من القلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم .

Artinya:

”Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. berdo'a: 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kemiskinan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kekurangan dan kehinaan, serta aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejam dan dizalimi”.

Masalah kemiskinan sangat kompleks dan multidimensi, berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, keragaman sumber daya dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan upaya pengentasan kemiskinan memerlukan perencanaan dan penanganan yang matang. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa negara memiliki

kewajiban untuk melaksanakan tugas dalam rangka mengatasi kemiskinan. Ibnu Taimiyah menyatakan (Islahi, 1997, p. 229):

"Merupakan kewajiban pemegang otoritas (imam) untuk mengumpulkan uang dari sumber manapun yang menjadi haknya (negara) dan membelanjakannya secara adil dan layak dilaksanakan dan tak pernah meniadakan hak dari mereka-mereka yang memang berhak"

"Sungguh merupakan perbuatan terbaik bagi pemegang otoritas untuk membedakan antara mereka yang patut menerima bantuan dan yang tak patut dan berlaku adil dalam mendistribusikan untuk tujuan kehidupan maupun urusan publik".

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa tanggung jawab negara tidak cukup hanya memenuhi standar hidup minimal, tetapi juga mengusahakan penduduk agar bisa hidup mandiri. Resep yang ditawarkan Ibnu Taimiyah untuk menghapus kemiskinan adalah pengembangan lembaga zakat, kafarat (denda), sedekah, dan hibah oleh pemerintah (Islahi, 1997, p. 228).

Terkait dengan masalah kemiskinan, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibu kota Indonesia memiliki fakta yang menarik tentang kemiskinan, termasuk juga program-program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan.

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta mengalami fluktuasi di sepanjang tahun 1987 sampai tahun 2002. Mulai dari tahun 1988 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang signifikan, dari 867.000 jiwa pada tahun 1987 menjadi 181.200 jiwa pada tahun 1997. Jumlah penduduk miskin kembali mengalami peningkatan mulai tahun 1998 kemudian kembali berkurang pada tahun 2000, dan pada tahun 2002 meningkat kembali sehingga jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta menjadi 291.300 jiwa atau 3,43 % dari jumlah penduduk DKI Jakarta.

Strategi penanganan kemiskinan yang dilakukan Pemda DKI Jakarta adalah dengan mencanangkan program baru atau melanjutkan program yang telah ada, termasuk proyek-proyek bantuan dari IMF dan Bank Dunia. Pemerintah dan IMF telah melaksanakan: (1) Program subsidi untuk kebutuhan pokok, pangan dan obat-obatan; (2) Program penanggulangan kemiskinan PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi); dan (3) Program Padat Karya.

Penanggulangan kemiskinan di perkotaan memadukan beberapa strategi, misalnya program KIP MHT III DKI (Kampung Improvement Muhammad Husni Thamrin dengan konsep Tribina), program peremajaan kampung kumuh dengan pendekatan CBD (*Community Based Development*), program P2BK (Pembangunan Perumahan Bertumpu pada kelompok), program IDT (Inpres Desa Tertinggal), program PPK (Program Pengembangan Kecamatan), program P3DT (Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal), dan program P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan).

Usaha pemerintah DKI Jakarta dalam mengentaskan kemiskinan juga bisa dilihat dari struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahunnya, APBD DKI Jakarta juga mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan propinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran pendapatan dan belanja yang lebih besar. Hal ini dapat dianggap wajar mengingat Jakarta sebagai ibu kota negara. Bangsa lain akan melihat Indonesia untuk kali pertama melalui perkembangan dan kemajuan ibu kota negara. Untuk belanja aparatur daerah dipergunakan bagi keperluan rumah tangga DKI Jakarta, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, dan sebagainya yang dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan belanja pelayanan publik adalah bagian belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan yang dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

Realisasi anggaran belanja pembangunan DKI Jakarta di bidang kesejahteraan rakyat setiap tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif. Anggaran belanja bidang kesra tahun 1987 senilai Rp. 87.192.204, sementara pada tahun 1997 meningkat menjadi Rp. 289.568.165.

Berkaitan dengan usaha pengentasan kemiskinan, pemerintah DKI Jakarta juga memperhatikan peranan pendayagunaan dana zakat yang dikelola Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta. Dalam pendayagunaan dana ZIS, BAZIS Provinsi DKI Jakarta memegang dua prinsip dasar. *Pertama*, pendayagunaan kepada mustahik perorangan diarahkan agar yang bersangkutan dapat hidup sejahtera dan mandiri dengan diberikan bantuan/modal usaha produktif. *Kedua*, pendayagunaan/penyaluran kepada lembaga yang diharapkan lembaga tersebut dapat menumbuhkan motivasi peningkatan swadaya pembangunan.

Pendayagunaan dana ZIS memiliki 2 sifat, yaitu bersifat bantuan dan bersifat santunan. Bersifat bantuan artinya pendistribusian dana yang diberikan untuk kepentingan dan kegiatan yang bersifat produktif. Bersifat santunan artinya dana yang diberikan untuk kepentingan dan kegiatan yang bersifat konsumtif. Pendistribusian tersebut tetap diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya umat, pemberdayaan ekonomi umat, dan penanggulangan masyarakat miskin perkotaan. Sehingga pendayagunaan dana ZIS tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, telah ikut membantu dan meringankan peran Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

1.2 Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Mayoritas ulama dan ekonom muslim telah sepakat bahwa kewajiban zakat bukan hanya untuk memenuhi kepentingan ibadah, tetapi juga berguna bagi kepentingan ekonomi dan pembangunan dalam mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan dana ZIS yang disalurkan kepada para mustahik dapat membantu mereka ke luar dari kemiskinan.

Usaha pengentasan kemiskinan juga dapat ditempuh melalui pengelolaan anggaran pengeluaran pemerintah yang baik. Laporan Bank Dunia (2001) menyebutkan bahwa penyusunan anggaran pengeluaran pemerintah yang efisien sangat penting, karena kontribusinya yang besar dalam mengentaskan kemiskinan.

Setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain.

Untuk belanja daerah dibagi atas dua bagian yakni belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin diperuntukkan bagi keperluan rumah tangga DKI Jakarta seperti pembayaran gaji pegawai, belanja barang, pembayaran angsuran hutang, belanja tak terduga dan lain-lain. Sebagian belanja pembangunan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat seperti belanja pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, pariwisata dan sebagainya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapitanya juga mengalami peningkatan. Hal ini seharusnya ikut mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan.

Keadaan yang sama juga terjadi pada pendayagunaan dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS) pada Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. Nominal penyaluran dana ZIS selalu bertambah dari tahun ke tahun.

Dari beberapa publikasi BPS dan BAZIS DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa fluktuasi perubahan antara anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita memiliki karakteristik dan tren yang sama. Rentang waktu tahun 1987 sampai dengan 1997, semuanya sama-sama memiliki tren positif atau bertambah dalam hal jumlah anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita. Kemudian pada tahun 1998 dan 1999 semuanya mengalami penurunan. Hal ini wajar karena Indonesia terpuruk secara ekonomi akibat krisis moneter. Baru kemudian pada tahun 2000 jumlah anggaran kembali mengalami peningkatan sampai ke tahun 2002.

Fakta berbeda terjadi pada jumlah penduduk miskin. Rentang waktu tahun 1987 sampai 1997, angka kemiskinan mengalami penurunan secara konstan. Sementara pada tahun 1998 dan 1999 angka kemiskinan meningkat karena adanya krisis moneter yang datang pertengahan tahun 1997. Kondisi kembali membaik dengan ditandai menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2000 dan 2001.

Terlihat hubungan antara anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita dengan tingkat kemiskinan sebagai hubungan terbalik. Ketika anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita mengalami peningkatan, maka angka kemiskinan menurun. Hal ini dibuktikan dengan fakta yang terjadi pada tahun 1987 sampai tahun 1997. Sebaliknya juga bisa terjadi ketika anggaran belanja bidang kesra,

pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita turun, maka angka kemiskinan naik. Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999.

Fakta tidak wajar terjadi pada tahun 2001 dan 2002, dimana anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita meningkat, pada tahun yang sama angka kemiskinan juga meningkat.

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah anggaran pengeluaran bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita yang meningkat, pada saat yang sama jumlah penduduk miskin juga terus meningkat.

Merujuk pada permasalahan dalam penelitian ini, maka pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita DKI Jakarta terkait dengan tingkat kemiskinan?
2. Bagaimana pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita DKI Jakarta terhadap tingkat kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui gambaran anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terkait tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita DKI Jakarta terhadap tingkat kemiskinan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini meliputi :

1. Daerah yang menjadi obyek penelitian adalah DKI Jakarta.
2. Tahun obyek penelitian adalah 1987 sampai 2002.

3. Anggaran pengeluaran pemerintah yang dipakai adalah bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi empat bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan.
4. Sumber data tingkat kemiskinan merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk yang dipublikasikan oleh BPS DKI Jakarta.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengeluaran pemerintah merupakan konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sadono, 1994). Penyusunan anggaran pengeluaran pemerintah yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi (Bank Dunia, 2001 dalam Widiastuti, 2008, p 45).

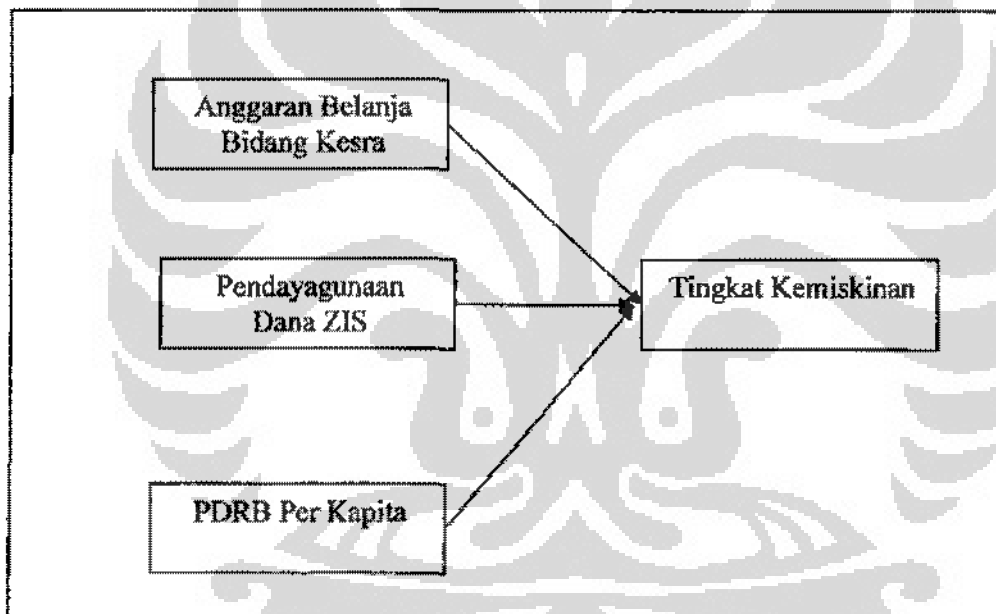
Ekonomi Islam memandang sisi pengeluaran pemerintah harus diarahkan kepada kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan utama yang meliputi: jaminan kebutuhan primer bagi setiap individu dan kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan.

Alawi (2006) membuktikan bahwa pengeluaran daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dialokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. *Pertama*, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, pengeluaran untuk *human capital investment*. *Ketiga*, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial.

Pengurangan tingkat kemiskinan juga bisa ditempuh dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang semakin tinggi secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Jika diperhatikan proses terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat, selain dari faktor internal seperti pemalas sebagai akibat dari nilai-nilai dan budaya yang dianut sebagian kaum miskin itu sendiri, juga disebabkan karena tertahannya hak milik mereka di tangan orang-orang kaya. Salah satu alat untuk memutusnya adalah zakat yang dapat dijadikan modal usaha dalam mengantisipasi secara dini agar tidak terjatuh dalam kemiskinan. Dengan sikap orang kaya yang menahan zakat tersebut, maka modal dan kekayaan akan bertumpuk di lingkungan orang-orang kaya saja, hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Dengan pengelolaan zakat yang baik diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Gambar 1.1
Model Kerangka Pemikiran.



1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

$H_0: \beta = 0$, tidak ada pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

$H_1: \beta \neq 0$, ada pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan DKI Jakarta.

1.7 Metode Penelitian

Langkah pertama yang ditempuh untuk memecahkan masalah adalah melengkapi data statistik dan informasi tentang anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, PDRB per kapita DKI Jakarta. Data-data statistik dan informasi tentang anggaran belanja bidang kesra, PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta diperoleh dari BPS Pusat dan BPS Provinsi DKI Jakarta. Sementara data pendayagunaan dana ZIS diperoleh dari Laporan Program Kerja BAZIS DKI Jakarta.

Pertanyaan pertama dari penelitian ini dijawab dengan mendeskripsikan tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai bagaimana anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita dialokasikan terhadap pengentasan kemiskinan. Pendekatan kualitatif deskriptif ini digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Pertanyaan penelitian kedua dijawab melalui pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah alat analisis yang menggunakan model matematik, statistik, dan ekonometrika. Penggunaan metode kuantitatif-ekonometrika dilakukan untuk membuat model persamaan regresi dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TM = \alpha + \beta_1 \text{ KESRA} + \beta_2 \text{ PDRB} + \beta_3 \text{ ZIS} + \varepsilon_j \quad (1.1)$$

Dimana :

TM = Jumlah Penduduk Miskin

α = Intercept atau konstanta

$\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi

KESRA = Anggaran Belanja Bidang Kesejahteraan

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

ZIS = Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah

ε_i = Standar error

Persamaan regresi penelitian ini akan dianalisis dengan analisis regresi linear berganda. Sementara pengolahannya dilakukan dengan menggunakan program Excel, SPSS, dan Eviews. Berdasarkan output hasil pengolahan, akan diketahui besaran pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta gambaran singkat tentang batasan masalah, kerangka teoritis, hipotesis dan metode penelitian. Bab I diakhiri oleh sistematika penulisan tesis.

Bab II. Tinjauan Pustaka.

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian (kerangka teori), dalam hal ini teori yang terkait dengan zakat dan pengaruhnya terhadap pendapatan nasional, anggaran pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan. Selanjutnya juga akan membahas hasil penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian. Dari hasil studi terdahulu tersebut akan dilakukan perbandingan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dari berbagai penelitian tersebut sehingga dapat diketahui benang merah dari penelitian tersebut.

Bab III. Metodologi penelitian dan Data.

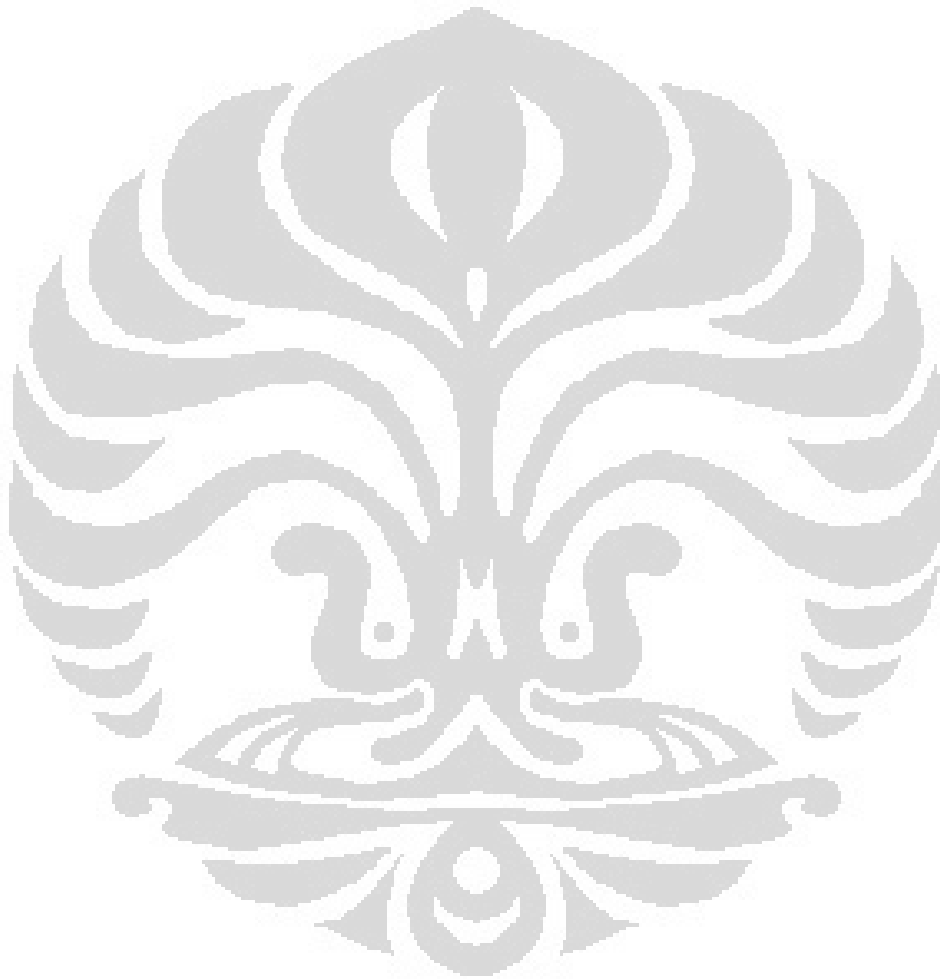
Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah sistematis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini terdiri dari pengantar, variabel penelitian, data dan sumber data, teknik dan model yang digunakan, dan akan ditutup dengan *flowchart* proses penelitian.

Bab IV. Analisis dan Pembahasan.

Bagian ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan karena berisi tentang hasil-hasil pengujian yang telah dilakukan, yang mana hasil pengujian tersebut akan dibahas satu persatu secara ringkas dan jelas.

Bab V. Kesimpulan dan Saran.

Pada bagian kesimpulan akan menjawab pertanyaan penelitian yang didasarkan pada data dan penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini ditutup dengan saran.



Universitas Indonesia

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang terkait dengan tema tesis ini, dan penerapan teori dalam pemecahan masalah.

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Anggaran Belanja Pemerintah

Pemerintah dalam Islam mempunyai fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif atau kewajiban publik dalam mewujudkan *falah*. Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami, memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2007 : hal 446-448):

- a. Derivasi dari konsep kekhilafahan,
- b. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*farid al kifayah*)
- c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*.

Pemerintah dalam menjalankan segala kebijakan yang ada memerlukan anggaran untuk berbagai jenis belanja dan pembiayaan. Anggaran belanja dan pembiayaan pemerintah harus diatur agar seimbang dengan pendapatan daerah. Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam pengurangan penduduk miskin dan menciptakan stabilitas ekonomi, serta peningkatan pendapatan per kapita (Bank Dunia, 2001, dalam Sairie Erfanie, 2005)

Secara konseptual, jenis pendapatan pemerintah maupun alokasi belanja pemerintah dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam hampir sama. Namun demikian, tujuan-tujuan yang ingin dicapai ekonomi Islam agak berbeda, mengingat prinsip-prinsip pengelolaan anggaran dalam Islam selalu ditujukan untuk menciptakan keadilan, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan Al-Quran dan hadits. Sedangkan dalam ekonomi konvensional kebijakan anggaran

hanya sebagai komplemen kebijakan moneter untuk pencapaian tujuan ekonomi makro yang sifatnya material seperti pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi.

Dalam pandangan ekonomi Islam, pemerintah juga menggunakan teori Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah, yang disesuaikan dengan jumlah pendapatannya. Namun biasanya, penyesuaian dilakukan pada bagian pengeluaran dan bukan bagian pendapatan. Tujuan dari adanya konsep anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Sementara tujuan pokok pemerintahan Islami adalah memaksimalkan kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh warga negaranya dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

Kegiatan yang menambah pengeluaran negara mempunyai dampak tertentu pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Berbeda dengan kitab-kitab agama lain, kitab suci Al-Quran telah menetapkan perintah-perintah yang sangat jelas dan tepat mengenai kebijakan negara tentang pendapatan dan pengeluaran negara. Misalnya pendapatan pemerintah dari zakat, harus disalurkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, seperti dimaksudkan untuk kaum miskin, membebaskan budak dan tawanan perang, membantu mereka yang terjerat utang, mereka yang di jalan Allah, dan untuk para musafir. Ini merupakan kewajiban Allah seperti tercantum pada Q.S. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan

untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Al-quran telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang di antara berbagai lapisan masyarakat. Islam tidak mengajarkan pemerintah untuk mengakumulasikan kekayaan, namun Islam mengajarkan untuk menyalurkan atau memproduktifitaskan harta yang berlebih.

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam ajaran Islam hal tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah *syar'iyah* dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari Al-quran dan hadits dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut antara lain (Suprayitno, 2005):

- a. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah masalah.
- b. Menghindari *masyaqqoh* (kesulitan) dan *madhorot* harus didahulukan dari pada melakukan pembenahan.
- c. Kerusakan individu dapat dijadikan alasan demi menghindari kerusakan dalam skala umum.
- d. Kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dalam skala umum.
- e. Berpedoman pada kaidah "*Al ghurnmu bil ghurni*" (pihak yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung kerugian).
- f. Berpedoman pada kaidah "*Ma la yatimmu al waajibu illa bihi fahua wajib*", (sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya).

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam merealisasikan efektivitas dan efisiensi dalam pola pembelanjaan pemerintah dalam Islam sehingga tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.

- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.

Adapun kaidah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas. Secara lebih rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini:

- 1) Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan azas masalah umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu.
 - 2) Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya.
 - 3) Tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, meskipun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin.
 - 4) Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syariah.
 - 5) Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, di mulai dari yang wajib, sunnah, dan mubah, atau *dharuriyah*, *hajiyat*, dan *rahsiniyat*.
- b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia. Mencakup pengadaan infrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
 - c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Bentuk pembelanjaan seperti ini biasanya melalui mekanisme subsidi, baik subsidi langsung maupun tidak langsung. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syariah yang memihak kepada kaum fakir miskin.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dilakukan melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Indonesia, pelaksanaan APBD sangat tergantung kepada APBN. APBD tidak dapat dilaksanakan secara efektif sebelum adanya pengesahan APBN. Karena salah satu sumber penerimaan daerah merupakan transfer uang dari pemerintah pusat dan pelaksanaan anggaran proyek sangat bergantung dari penyelesaian administrasi dari pemerintah pusat (Riduansyah, 2000).

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi pemerintah adalah agen dari Tuhan atau *khalifatullah* untuk merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al Quran dan Sunnah. Kehidupan Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin* merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah pada dasarnya memegang amanat dari masyarakat. *Fard al-kifayah* merupakan kewajiban yang ditujukan kepada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa sementara jika telah dilaksanakan (bahkan hanya oleh satu orang), maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Dengan kata lain, jika individu gagal untuk menjalankan kewajiban tersebut, maka ia akan menjadi beban publik. Beberapa contoh dari kewajiban yang mengacu pada konsep *fard al kifayah* adalah pelayanan medis, pendidikan dan lain-lain.

Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan *fard al kifayah* ini karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik, kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan *fard al-kifayah* ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. asimetri dan kekurangan informasi;
- b. pelanggaran moral;
- c. kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.

Masyarakat kemungkinan tidak memiliki informasi yang memadai tentang adanya suatu kewajiban publik, sehingga mereka tidak melaksanakannya. Dalam kenyataannya, pemerintah biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap dan

akurat dibandingkan masyarakat, karena pemerintah memiliki sumberdaya yang lebih baik dalam mencari dan mengolah informasi. Seandainya informasi ini diketahui masyarakat, maka belum tentu mereka akan dapat menjalankannya karena alasan rendahnya kesadaran terhadap *fard al-kifayah* ini. Jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban publik rendah, maka mereka tidak akan melakukannya, meskipun mengetahui adanya kewajiban ini. Bahkan, masyarakat kemungkinan juga akan mengabaikan atau setidaknya tidak dapat melaksanakannya kewajiban publik dengan baik karena ketiadaan sumber daya atau keahlian yang dibutuhkan. Jika salah satu atau ketiga hal tersebut terjadi, maka pemerintah harus mengambil alih kewajiban publik tersebut. Dalam contoh ini terkait dengan kewajiban publik di bidang pendidikan dan kesehatan..

Dalam konteks anggaran pembangunan, Suparmoko (2004: 44) menjelaskan bahwa anggaran pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pengeluaran pemerintah dapat dinilai dari beberapa segi, sehingga dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang.
- b. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
- c. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.

Pembagian jenis pengeluaran daerah di atas memudahkan pemerintah dalam menentukan fungsi alokasi dan untuk apa alokasi anggaran pengeluaran tersebut. Fungsi utama kebijakan anggaran adalah:

- 1) Fungsi alokasi dari kebijakan anggaran, suatu kebijakan anggaran pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh pasar. Dilakukan dengan cara penyediaan barang sosial, atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang pribadi dan barang sosial, dan bagaimana bauran/komposisi barang sosial ditentukan. Penyediaan dengan alokasi anggaran pengeluaran ini sangat vital karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah daerah harus menyediakan

barang dan jasa publik untuk memperlancar aktivitas pembangunan masyarakat.

- 2) Fungsi disrtibusi, penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu keadaan distribusi yang merata dan adil. Fungsi disrtibusi anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan otonomi daerah tercermin dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan anggaran pendapatan asli daerah yang tersusun pada bagian pendapatan daerah.
- 3) Fungsi stabilisasi, penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya dan laju pertumbuhan yang tepat, dengan memperhitungkan segala akibatnya terhadap perdagangan dan neraca pembayaran. Fungsi stabilisasi merupakan suatu kebijakan anggaran yang digunakan pemerintah untuk mengatasi situasi moneter atau situasi pasar tertentu yang menyebabkan pemerintah memandang perlu melakukan suatu kebijakan pengeluaran yang dapat menstabilkan harga-harga barang yang langsung berdampak terhadap kepentingan ekonomi publik.

Pengeluaran pemerintah dalam APBD mencerminkan kebijakan pemerintahan suatu daerah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu program atau kebijakan membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi, serta peningkatan pendapatan per kapita.

Selain itu, pengeluaran pemerintah terutama bidang kesejahteraan akan meningkatkan produktivitas penduduk sehingga bisa meningkatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya bisa mengurangi kemiskinan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran bidang kesejahteraan sangat

bermanfaat untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mengurangi penduduk miskin, seperti penelitian yang dilakukan Fan et. all (2000) Gomancee at.al (2003), Brata (2005), Alawi (2006) dan Chemingui (2007).

Brata (2002) telah membuktikan bahwa investasi sektor publik untuk bidang sosial membawa manfaat bagi pembangunan manusia dan kesejahteraan penduduk. Investasi bidang sosial tersebut menghasilkan manfaat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pembangunan manusia yang berhasil juga membawa manfaat pada penurunan tingkat kemiskinan.

Sementara Alawi (2006) membuktikan bahwa pengeluaran daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dialokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. Pertama, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengeluaran untuk human capital investment. Ketiga, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial.

2.1.2 Zakat Sebagai Alat Pengentasan Kemiskinan

Salah satu penyebab kemiskinan selain dari faktor internal seperti sifat malas sebagai akibat dari nilai dan budaya yang dianut, adalah tertahannya modal atau kapital di kalangan orang-orang kaya. Islam memberikan solusinya dengan kewajiban zakat, dan anjuran untuk infaq-shadaqah.

Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam berbagai segi, yaitu jaminan atas individu dengan dirinya sendiri, dengan keluarga dekat, dengan masyarakat dan antara umat dengan umat lainnya. Beberapa ayat Al-quran dan hadits Rasulullah memberikan dorongan agar umat Islam selalu tanggap dan peka terhadap problema sosial. Ayat-ayat yang membangkitkan semangat sosial ini tampil dengan tema seperti term *aqabah* (pendakian yang tinggi), *birr* (nilai kebajikan) dan zakat. Dengan kepekaan sosial secara tajam akan dapat mengamati realita di lingkungan sosial di mana seseorang berada.

Ajaran islam membebani negara dengan tanggung jawab pokok untuk menjamin setidaknya-tidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara. Terutama sekali merupakan kewajiban seseorang untuk mempunyai

nafkah penghidupan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun demikian, dalam perkara dimana seseorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup atau penghasilan seseorang tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka orang tersebut memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial. Ajaran islam secara moral mendorong kaum kaya untuk menolong kaum miskin dan dijanjikan akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat, bagi mereka yang membelanjakan uang untuk kesejahteraan kaum fakir miskin. Manusia diperintahkan untuk memperlihatkan perhatian yang khusus terhadap kebutuhan para kerabat yang miskin.

Dengan demikian kewajiban zakat, mempunyai landasan kuat dalam menegakkan suatu jaminan sosial. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang yang membutuhkan, yaitu dalam bidang pangan, sandang, perumahan dan sebagainya. Zakat sebagai salah satu model jaminan sosial dalam Islam tidak semata ditujukan untuk kesejahteraan kaum muslimin, tetapi mencakup seluruh penduduk dan masyarakat yang hidup di bawah naungan kekuasaan pemerintahan Islam.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai salah satu indikator makro ekonomi, pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sering dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang menjadi fokus pengukuran adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Dalam bahasa ekonomi, produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto atau Produk Domestik Bruto. PNB atau PDB mengukur hasil keseluruhan dari sebuah negara, padahal jumlah penduduk negara berlainan, untuk bisa memperbandingkan, dipakai ukuran PNB/kapita atau PDB/kapita. Dengan itu dapat dilihat dari berapa produksi rata-rata setiap orang dari negara yang bersangkutan.

Dengan adanya tolok ukur ini kita dapat membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai PDB/kapita/tahun sama dengan US \$750 dianggap lebih berhasil pembangunannya dari pada negara lain yang PNB/kapita/tahunnya adalah US \$500.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam pengertian ekonomi makro adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan pendapatan nasional. Sementara pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan hasil kegiatan ekonomi seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah, atau sering dikatakan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Mekanisme pertumbuhan yang dipertimbangkan Islam adalah dengan menetapkan peranan manusia yang dipusatkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dengan memelihara kedudukan manusia yang bermartabat, Islam menyerukan betapa pentingnya kebebasan individu dalam mengejar jenis kegiatan ekonomi yang dipilihnya.

2.1.4 Kemiskinan

Bank Dunia (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketercerabutan dari kehidupan yang layak. Miskin adalah keadaan kelaparan, kurang tempat tinggal, kurang sandang, dan kurang pendidikan. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk dalam kategori miskin, diantaranya:

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terkena guncangan ekonomi.

Sementara Todaro (2000) menyatakan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Todaro juga menjelaskan bahwa adanya variasi kemiskinan disebabkan oleh: (1) perbedaan geografis, penduduk, dan pendapatan, (2) perbedaan sejarah, (3) perbedaan kekayaan SDA dan kualitas SDM, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur perindustrian, (6) perbedaan pada ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dari negara lain., dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negeri (Alawi, 2006).

Perhatian Islam terhadap masalah kemiskinan sangat besar sekali. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa Islam semenjak diturunkan di kota Mekkah, dimana umat Islam masih minoritas, dikejar-kejar, dan tertindas, sudah mempunyai kitab suci Al-quran yang memberikan perhatian penuh pada masalah sosial termasuk kemiskinan. Al-quran adakalanya menyatakan dengan kata-kata "memberi dan mengajak makan orang-orang miskin" (Q.S. 74:38-46), dan adakalanya dengan kalimat "mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah" (Q.S. 68:19-33), "memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin dan terlantar dalam perjalanan" (Q.S. 51:19-20), "membayar zakat" (Q.S. 30:38-39, Q.S. 27:1-3, Q.S. 31:4) dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lainnya (Qardawi, 1993).

Ajaran Islam melihat kemiskinan adalah suatu hal yang tidak berdiri sendiri, bahkan merupakan bagian dari masalah manusia di dunia ini. Dengan kata lain, kemiskinan dan kekayaan bukanlah pembawaan sejak lahir, maka tentunya kedua hal tersebut, timbul kemudian setelah melalui sebab-akibat yang melibatkan berbagai aspek. Tidak jarang seseorang lahir di tengah-tengah keluarga miskin, namun di dalam pertumbuhannya ia menjadi kaya, dan sebaliknya juga tidak

Jarang seseorang dilahirkan dari keluarga kaya, namun dikemudian hari ia menjadi miskin. Ada beberapa hal yang dapat menimbulkan kemiskinan dan kemelaratan, antara lain:

1. Kelemahan, termasuk kelemahan hati dan semangat, kelemahan akal dan ilmu, atau kelemahan fisik. Semuanya itu mengurangi daya pilih dan daya upaya manusia, sehingga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pencipta, pembangun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Kemalasan, sifat ini merupakan pangkal utama kemiskinan. Penataan hidup sehari-hari yang diajarkan Islam sangat bertolak belakang dengan sifat ini.
3. Ketakutan, juga merupakan penghambat utama untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan dan usaha, karena keberhasilan seseorang dalam merintis suatu pekerjaan banyak tergantung kepada keberanian yang dimiliki orang tersebut.
4. Kepelitan, hal ini bersangkutan dengan orang kaya, karena dengan kepelitannya itu dapat membantu untuk tidak mengurangi kemiskinan, dan menjadikan dirinya sebagai sarana untuk dibenci oleh orang miskin.
5. Terjerat utang, ajaran Islam selalu mengingatkan untuk berhati-hati jangan sampai terjerat utang, karena utang sangat membelenggu kebebasan, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang yang sudah terbiasa membiayai hidupnya dengan utang akan sulit untuk mengangkat dirinya dari kemiskinan.
6. Diperas atau dikuasai oleh sesama manusia, merupakan penyebab timbulnya banyak penderitaan dan kemelaratan, baik pada tingkat perorangan maupun pada tingkat masyarakat bangsa dan negara. Pemerasan manusia yang berkuasa, menimbulkan sistem perbudakan yang kerap dipakai kapitalisme. Kenyataan ini dapat dilihat pada negara-negara jajahan atau setengah jajahan membuktikan dengan jelas betapa besar kemiskinan yang melanda masyarakat berabad-abad

lamanya sebagai akibat langsung dari sistem imperialisme (Ali Yafie, 1994).

Al-quran sebagai kitab suci umat Islam juga mewajibkan setiap muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak memiliki kemampuan materi, paling sedikit partisipasinya diharapkan dalam bentuk merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif. Al-quran secara tegas dalam Q.S. 107:1-3 menepi mereka yang enggan berpartisipasi (walau dalam bentuk minimal) sebagai orang yang telah mendustakan agama dan hari kemudian (hari kiamat) (Shihab, 1996). Qardawi (2006) misalnya memaparkan sarana untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu: bekerja, jaminan sanak famili yang berkelapangan, dan zakat. Demikian juga menurut Daud Ali ada beberapa jalan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan masalah kemiskinan menurut ajaran Islam, antara lain:

1. Bekerja, berusaha sendiri untuk mengatasi kemiskinan yang menimpa seseorang. Ajaran Islam sangat mengutamakan usaha atau kerja atau amal seseorang untuk mengatasi keadaan diri dan keluarganya. Allah telah menyediakan rezeki dan manusia diperintahkan mencari rezeki itu melalui amal atau kerjanya sendiri.
2. Bantuan keluarga atau kerabat dekat. Upaya ini dapat ditempuh melalui lembaga infak, sedekah, dan amal-amal jariyah lainnya. Upaya itu juga dapat dilaksanakan melalui lembaga kewarisan menurut ajaran Islam.
3. Bantuan tetangga dan masyarakat. Melalui lembaga zakat yang dengan tegas-tegas menyatakan harta tetangga atau anggota masyarakat yang mempunya, terdapat hak fakir miskin yang tidak mempunya. Hak itu wajib dikembalikan kepada yang berhak menerimanya (fakir, miskin) melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
4. Bantuan negara untuk memecahkan (mengentaskan) masalah kemiskinan dengan berbagi upaya yang mungkin dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas negara dalam mewujudkan masyarakat

yang sejahtera dan baik, di bawah naungan ampunan Ilahi yang disebut dalam Al-Qurandengan istilah *baladatan thayyibatun wa rabbun ghafur* (Muhaam Daud Ali dan Habibah Daud, 1995).

Dalam hal pengentasan kemiskinan, Todaro (2003) menyebutkan ada empat pilihan bidang yang terbuka bagi intervensi kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi distribusi pendapatan:

1. Perbaikan distribusi pendapatan fungsional melalui serangkaian kebijakan yang khusus dirancang untuk mengubah harga-harga faktor produksi. Distribusi fungsional adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tingkat hasil yang diterima dari faktor-faktor produksi.
2. Perbaikan distribusi melalui redistribusi progresif kepemilikan aset-aset.
3. Pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan bawah.
4. Peningkatan ukuran distribusi eklompok penduduk termiskin melalui pembayaran transfer secara langsung dan penyediaan berbagai barang dan jasa atas tanggungan pemerintah.

Sejalan dengan pemikiran Todaro diatas, Stiglitz (2007) menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah bisa mendorong sektor bisnis untuk ikut mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja. Satu contoh, salah satu sumber penciptaan lapangan kerja di banyak negara adalah usaha kecil dan menengah. Mereka biasanya sulit mendapatkan modal atau pinjaman. Pemerintah harus memerhatikan kesulitannya sehingga mereka bisa tumbuh dan menciptakan lapangan kerja. Stiglitz (2007) dengan tegas menyatakan bahwa:

“Masalah pada kemiskinan adalah tiap orang tidak punya uang. Jadi, pendidikan dan kesehatan untuk orang miskin harus dilakukan negara. Caranya, membuat asuransi untuk orang paling miskin dengan membagi iurannya, mendirikan klinik kesehatan (puskesmas) untuk imunisasi, memperbanyak paramedis, dan memperluas pemakaian obat generik agar tidak dieksploitasi oleh perusahaan multinasional, dan mewajibkan lisensi obat. Kalau Anda miskin, tentu harus lebih efisien dalam menggunakan uang Anda, tetapi Anda tidak dapat mengasumsikan bahwa orang miskin tidak dapat membayar layanan kesehatan itu”.

Selain itu juga penting melihat koperasi dan kewirausahaan. Di banyak negara banyak koperasi diambil alih pemerintah dan tidak independen. Stiglits

mengatakan "Tetapi, ke depan, pengalaman itu jangan membuat kita tidak mau membangun koperasi. Di AS, koperasi pertanian sangat kuat dan perusahaan mentega terbesar di sana dimiliki koperasi" (Kompas, 2007).

Mengenai globalisasi dan kemiskinan. Stiglitz (2002) mengakui bahwa dinamika globalisasi dan berbagai pengaruh penting lainnya telah melahirkan suatu realitas serba ketidakpastian dan ketidakpuasan, kemudian melahirkan virus kemiskinan dan ketidakadilan. Fakta menunjukkan terjadinya ketimpangan ekonomi yang sangat mencolok antara negara kaya dan berkembang. Sebanyak 40 persen dari total populasi dunia hidup di negara miskin, namun hanya 3 persen dari pendapatan per kapita dunia di serap negara itu. Sementara Negara kaya hanya 14 persen dari populasi dunia tetapi dapat menyerap sebanyak 75 persen dari pendapatan perdagangan dunia. Kondisi kemiskinan dunia begitu memilukan, sampai kini sebanyak 50.000 orang meninggal tiap harinya karena kemiskinan, dalam setiap detik ada tiga orang anak meninggal. Di sisi lain, lembaga internasional yang selalu mempromosikan globalisasi (IMF, WTO dan IFIs lainnya) senantiasa berpihak kepada kepentingan pemodal, bahkan dianggap oleh berbagai kalangan sebagai forum legitimasi dan ajang pemaksaan Negara-negara maju atas dunia ketiga (Chalid, 2007).

Stiglitz (2007) mengamati ketimpangan antara PDB suatu negara yang demikian besar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun di sisi lain masyarakatnya amat miskin. Atas hal ini, beliau mengemukakan ketidaksetujuannya mengenai penggunaan PDB sebagai indikator keadaan ekonomi suatu negara. Stiglitz mengambil contoh salah satu perusahaan pertambangan di Indonesia. Bila serta merta memasukkan nilai komoditas barang tambang tersebut tentulah PDB Indonesia akan besar. Namun bila dikurangi komoditas yang dibawa keluar Indonesia (untuk "disetor" kepada *stakeholders*-nya di negara induk semang perusahaan tambang tersebut) dan disertai kalkulasi atas kerusakan alam yang timbul tentu kesimpulan yang didapat akan berbeda (Banjaransari, 2007)

2.2. Penelitian-penelitian Tentang Anggaran Belanja, Zakat, dan PDRB.

Penelitian tesis ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, menjadi penting di sini untuk memaparkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan tesis ini. Nadhif Alawi (2006) melakukan penelitian yang ingin menjawab apakah secara statistik terbukti ada kaitan signifikan antara tingkat kemiskinan dengan anggaran belanja pembangunan daerah, yaitu pengeluaran pembangunan yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, digunakan studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan Todaro bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan daerah rata-rata dan distribusi pendapatan di daerah tersebut (Todaro, 2000) dan strategi mengatasi kemiskinan menurut *World Bank*, yaitu (1) mendorong pertumbuhan ekonomi; (2) *human capital investment*; dan (3) menyediakan jaminan sosial, maka anggaran belanja pembangunan daerah diduga secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu daerah.

Penelitian Nadhif mengamati proses bagaimana pendapatan daerah mempengaruhi kemiskinan, yaitu dengan melihat pola anggaran belanja untuk kebutuhan pembangunan yang dialokasikan kepada tiga jenis pengeluaran. *Pertama*, pengeluaran untuk kebutuhan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, pengeluaran untuk *human capital investment*. *Ketiga*, pengeluaran untuk menyediakan jaminan sosial.

Daerah yang menjadi bahan bahasan adalah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Data utama yang digunakan adalah data sekunder dari BPS, yaitu: (1) Data dan informasi kemiskinan Kabupaten tahun 2002 – 2004; dan (2) Statistik keuangan daerah kabupaten/kota 2001-2003.

Model ekonometri digunakan dalam penelitian untuk menguji keterkaitan antara Anggaran Belanja Pembangunan Daerah dengan kemiskinan. Variabel-variabel yang akan digunakan adalah :

1. Variabel dependent: tingkat kemiskinan, datanya yaitu:
 - i. Indeks kemiskinan (P4)
 - ii. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)
 - iii. Indeks keparahan kemiskinan (P2)

2. Variabel independent utama, yaitu data realisasi pengeluaran APBD kabupaten/kota yang dikelompokkan menjadi:
 - i. Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Program Pertumbuhan Ekonomi (PPE).
 - ii. Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
 - iii. Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Program Jaminan Sosial (PJS).
3. Variabel kontrol, data yang digunakan adalah:
 - i. Persentase jumlah penduduk yang bekerja <15 jam (KER)
 - ii. Angka melek huruf di atas 15 tahun (PEND)
 - iii. Persentase pengguna alat KB (KES)

Dengan demikian, persamaan atau model yang akan diregresi adalah sebagai berikut:

$$Pjt = f(PPE_{i(t-1)}, PPM_{i(t-1)}, PJS_{i(t-1)}, KER_{it}, PEND_{it}, KES_{it}) \quad (2.1)$$

Keterangan:

$J = 0, 1, 2$; $i =$ kabupaten/kota; $t =$ tahun 2002, 2003, 2004.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi parameter model adalah pendekatan data panel. Persamaan regresi data panel berdasarkan persamaan:

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \mu_{it} \quad (2.2)$$

Di mana $i = 1, \dots, N$; dan $t = 1, \dots, T$.

Temuan utama dari penelitiannya adalah pembuktian bahwa ketiga jenis pengeluaran tersebut berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa Tengah. Lebih jauh lagi, penelitian ini mendukung hipotesa adanya hubungan yang searah antara usaha pertumbuhan ekonomi dan usaha mengurangi kemiskinan, terbukti dan hubungan yang negatif antara tingkat kemiskinan dengan pengeluaran dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tentang peran ZIS dilakukan oleh Nur Rianto (2006) yang menganalisis efek multiplier zakat dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan di Propinsi DKI Jakarta, serta membandingkan efek multiplier zakat terhadap tingkat

pendapatan dengan efek multiplier dari suatu perekonomian tanpa memasukkan unsur zakat.

Model penelitian yang digunakan adalah persamaan makroekonomi yang meliputi dua model, *pertama*, persamaan pendapatan nasional perekonomian tiga sektor. *Kedua*, persamaan konsumsi yang menggunakan persamaan konsumsi yang dikembangkan oleh Metwally (1993) dengan model *absolute income hypothesis*:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perekonomian dengan adanya unsur zakat di dalamnya menghasilkan besaran multiplier terhadap pendapatan sebesar 2,0679, sementara pada perekonomian tanpa ada unsur zakat menghasilkan nilai multiplier terhadap pendapatan sebesar 3,3239. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZIS DKI Jakarta masih belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian.

Mulyaningsih (2008) melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan*". Ada tiga tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. *Pertama*, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia. Pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Dimensi penting tersebut terangkum dalam indeks pembangunan manusia. *Kedua*, untuk melihat apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan. *Ketiga*, melihat apakah ada pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan.

Data yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan data *cross section* (data antar propinsi) dan data *time series* tiga tahunan (tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005). Data tersebut diperoleh dari beberapa hasil publikasi BPS, serta data dari APBD masing-masing propinsi.

Dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian digunakan analisis dengan metode kuantitatif. Metode

kuantitatif digunakan untuk membuat model regresi. Model regresi yang diperoleh selanjutnya akan diestimasi dengan metode tertentu.

Setelah diperoleh model regresi dari data panel tersebut, maka akan dilakukan estimasi dengan metode PLS, efek tetap dan metode efek random. Selanjutnya baru dilakukan pengujian atas model tersebut dengan uji Chow, Hausman dan uji LM. Setelah ditetapkan model yang tepat dengan uji tersebut, dilakukan pengujian kelayakan model taksiran sehingga diperoleh sifat BLUE.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pada model persamaan 1 yaitu pengaruh antara pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia terlihat arah koefisien yang negatif. Koefisien yang negatif tersebut tidak sesuai dengan hipotesis. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia yang *diproxi* dari indeks pembangunan manusia. Hal tersebut terkait dengan masih rendahnya pengeluaran pemerintah di sektor publik terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Seperti halnya dengan model persamaan 1, model persamaan 2 yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan, kesimpulan hasil analisis data tidak berbeda jauh dengan model 1. Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran publik tidak terbukti mempengaruhi kemiskinan. Seperti halnya penjelasan dalam model 1, diduga karena sangat kecilnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) membuatnya tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
3. Dalam model 3 tentang pengaruh pembangunan manusia terbukti secara signifikan mampu mempengaruhi terhadap kemiskinan. Seperti kita ketahui pembangunan manusia yang *diproxi* dari indeks pembangunan manusia (*human development index*) memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*)

dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. *Longevity* diukur dari angka harapan hidup, *knowledge* direpresentasikan oleh ukuran angka melek huruf dewasa dan rata-rata sekolah sementara akses terhadap sumberdaya diukur dari paritas kekuatan daya beli riil terhadap pendapatan per kapita. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Penelitian tentang pengaruh belanja pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan diantaranya dilakukan oleh Chemingui (2007) dalam "*Public Spending and Poverty Reduction in an oil Based Economy: The Case of Yemen*". Penelitian ini untuk menilai efek pengeluaran pemerintah dalam terhadap kemiskinan, menggunakan alat analisis komprehensif yaitu a *computable general equilibrium* model (CGE). Beberapa tipe dari model menjadi alat standar untuk menilai kebijakan publik dan distribusi pendapatan secara terintegrasi. Untuk tujuan tersebut, model CGE dinamis dibangun berdasarkan skenario untuk perubahan kemiskinan dan ekonomi di Yaman selama periode 1998-2016 dalam mencari skenario alternatif yang kemudian akan diisolasi dengan dampak spesifik kemudian. Alternatif skenario diasumsikan meningkat di pengeluaran pemerintah di sektor tertentu, yang akan meningkatkan *total productivity factor* (TFP). Beberapa perbaikan dalam TFP akan mempengaruhi keseluruhan ekonomi, dan terutama dalam level kemiskinan. Model CGE digunakan untuk menilai secara detail efek skenario alternatif yang berhubungan dengan eksperimen pengeluaran publik.

Dalam melakukan eksperimen tersebut di-evaluasi efek dari pengeluaran publik untuk sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan. Terlihat bahwa pengeluaran sektor publik di bidang pertanian hanya meningkatkan TFP di sektor tersebut saja. Sementara untuk pengeluaran publik di sektor pendidikan dan kesehatan ternyata mampu meningkatkan TFP untuk semua sektor.

Selain itu juga ada penelitian Brata (2005) berjudul "*Investasi Sektor Publik lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*". Dari studi tersebut diketahui, bahwa investasi di sektor publik lokal ini sangat bermanfaat terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Fokus studi

yang telah dilakukan hanya sebatas investasi di tingkat lokal sehubungan pelaksanaan otonomi daerah. Adapun variabel utama yang digunakan dalam penelitiannya terdiri dari variabel pembangunan sosial (bidang pendidikan dan kesehatan), variabel pembangunan manusia, dan kemiskinan. Adapun untuk variabel pembangunan sosial menggunakan kategorisasi pengeluaran pembangunan dari Lewis & Chakeri (2004).

Selain itu juga digunakan variabel lainnya yaitu variabel investasi swasta (total dari penanaman modal dalam negeri/PMDN dan penanaman modal asing/PMA) dan distribusi pendapatan (indeks Gini). Variabel tersebut diintrodusir mengingat variabel tersebut juga turut menentukan capaian pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.

Estimasi dilakukan dengan menggunakan model OLS terhadap data *pooled* tahun 1996, 1999 dan 2002. Data *pooled* tersebut merupakan data dari seluruh propinsi di Indonesia. Sebelum di estimasi, data diolah terlebih dahulu. Pertama mengolah data pengeluaran pemerintah dari APBD. Laporan APBD sebelum tahun 2000 masih disajikan menurut tahun anggaran, baru mulai tahun 2000 menjadi tahun kalender. Data tahun anggaran dikonversikan menjadi tahun kalender dengan menggunakan rumus sederhana berikut, misalnya untuk tahun 1996 diperoleh perhitungan $(25\% \times \text{pengeluaran pemerintah tahun } 1995/96) + (75\% \times \text{pengeluaran pemerintah tahun } 1996/1997)$. Secara implisit rumus tersebut mengasumsikan bahwa pengeluaran untuk satu tahun anggaran terdistribusi merata untuk seluruh bulan. Kemudian setelah semua data tahun anggaran dikonversi ke dalam data tahun kalender selanjutnya dilakukan prosentase terhadap data pengeluaran pembangunan.

Selanjutnya untuk variabel pembangunan diperoleh dari data indeks pembangunan manusia dari hasil publikasi Bappenas-BPS-UNDP. Variabel lainnya yaitu penduduk miskin. Data tingkat kemiskinan tersebut merupakan prosentase dari jumlah penduduk. Disamping ketiga variabel tersebut dalam penelitian yang dilakukan Brata (2004) juga menggunakan variabel lainnya yaitu distribusi pendapatan dan investasi. Data yang diperlukan adalah data indeks gini untuk variabel distribusi pendapatan, data PMDN dan PMA untuk variabel investasi swasta.

Setelah dilakukan pengolahan data baru selanjutnya melakukan estimasi. Hasil estimasi yang terpilih adalah hasil estimasi yang terbaik berdasarkan tingkat signifikansinya. Berdasarkan hal tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa variabel pembangunan sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Selain itu pengeluaran sosial juga memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Namun demikian pengaruh dari sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan tampak lebih besar daripada pengaruh pengeluaran sosial.

Tabel 2.1
Ikhtisar Penelitian-penelitian Sebelumnya

No	Name & Judul Penelitian	Data	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Rianto (2006), "Efek Multiplier Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan di Propinsi DKI Jakarta".	Data Panel Data sekunder yang diperoleh dari BPS dan BAZIS DKI Jakarta.	Pendekatan persamaan simultan dengan metode analisis 2SLS	Efek multiplier zakat terhadap pendapatan sebesar 2,0679, sedangkan pada ekonomi tanpa zakat multiplier pendapatan sebesar 3,3239. Hal ini memperlihatkan bahwa efek multiplier zakat masih belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam perekonomian.
2.	Nadhif Alawi (2006), "Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 – 2004)"	Data Panel Data Sekunder yang diperoleh dari BPS.	Persamaan regresi panel data berdasarkan persamaan: $Y_{it} = \alpha + \sum X_{it}\beta + \mu_{it}$	1. Pembuktian bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketiga jenis ukuran kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Jawa Tengah 3. Alokasi pengeluaran untuk <i>human capital investment</i> belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kedalaman kemiskinan, walaupun tingkat keparahan kemiskinan dapat dikurangi. 4. Alokasi pengeluaran untuk kepentingan menyediakan jaminan sosial telah berhasil memperbaiki tingkat kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan.
3.	Yani Mulyaningih (2008), "Pengaruh	Data Panel tahun 1996 2005	Persamaan regresi sederhana dengan	1. Pengaruh antara pengeluaran pemerintah

	Pengeluaran Pemerintah Di Sektor publik Terhadap Pembangunan Manusia dan Kemiskinan”.	Data sekunder diperoleh dari BPS	data panel. Estimasi dengan metode PLS, efek tetap dan efek random. Uji model dengan uji Chow, Hausman, dan uji LM.	di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia terlihat arah koefisien yang negatif. 2. Pengeluaran publik tidak terbukti mempengaruhi kemiskinan. 3. Pengaruh pembangunan manusia terbukti secara signifikan mampu mempengaruhi terhadap kemiskinan.
4.	Chemingui (2007), “Public Spending and Poverty Reduction in an Oil Based Economy : The Case of Yemen”	Data Panel 1998 - 2016	Analisis model <i>computable general equilibrium</i> (CGE)	Pengeluaran sektor publik di bidang perikanan hanya meningkatkan <i>total factor productivity</i> (TFP) di sektor tersebut saja. Sementara untuk pengeluaran publik di sektor pendidikan dan kesehatan ternyata mampu meningkatkan TFP untuk semua sektor.
5.	Brata (2005), “Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan kemiskinan”.	Data pooled tahun 1996, 1999, dan 2002.	Estimasi data dengan menggunakan model OLS	Variabel pembangunan sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan manusia. Selain itu pengeluaran sosial juga memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Namun demikian pengaruh dari sumber daya manusia terhadap tingkat kemiskinan tampak lebih besar daripada pengaruh pengeluaran sosial.

2.3. Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah.

Permasalahan utama yang mendasari penelitian ini adalah anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, PDRB per kapita yang terus meningkat, sementara tingkat kemiskinan juga terus meningkat. Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, dimana anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita yang terus meningkat mengakibatkan tingkat kemiskinan menurun.

Pembahasan pertama tentang bagaimana gambaran anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB perkapita. Pembahasan tersebut akan merujuk pada penelitian Alawi (2006) tentang anggaran pengeluaran pada kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dalam penelitian itu, Alawi menggambarkan profil anggaran belanja pembangunan dan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan eksplorasi terhadap data-data dari BPS.

Penelitian ini juga membahas bagaimana pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Masalah tersebut dijawab dengan terlebih dahulu mencari teori-teori yang menyatakan bahwa anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS dan PDRB per kapita berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Besaran angka pengaruh masing-masing variabel akan dihitung melalui teknik ekonometrika. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu juga, penelitian yang akan dilakukan ini menyelidiki sisi pengeluaran daerah yang akan dikombinasikan dengan pendayagunaan dan ZIS, untuk diperbandingkan dengan angka kemiskinan. Lokasi penelitian ini adalah DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian di Indonesia, juga menjadi ibu kota Indonesia. Dalam penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana alokasi anggaran pengeluaran pemerintah DKI Jakarta dan pendayagunaan dana ZIS oleh BAZIS DKI Jakarta, dan juga ingin mengetahui apakah anggaran pengeluaran pemerintah DKI Jakarta dan pendayagunaan dan ZIS oleh BAZIS DKI Jakarta berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jakarta atau tidak.

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian guna memperoleh pengetahuan secara teoritis dengan cara membaca dan mencatat dari berbagai literatur, *text book*, artikel-artikel, buku-buku ilmiah dan materi perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dasar dalam pembahasan masalah yang ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN DAN DATA

Pada bagian ini pembahasan difokuskan kepada metodologi penelitian dan data yang berkaitan dengan langkah-langkah sistematis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pembahasannya meliputi metodologi untuk pemecahan masalah, data yang digunakan, tahap/prosedur penyelesaian masalah, dan *flow chart* tahap penyelesaian masalah.

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data yang berkaitan dengan pendayagunaan dana ZIS diperoleh dari BAZIS DKI Jakarta. Data yang berkaitan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan tingkat kemiskinan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta. Sedangkan data tentang anggaran belanja bidang kesra diperoleh dari BAPPEDA dan biro keuangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Jenis data yang dipakai adalah data *time series* mulai tahun 1987 sampai dengan 2002. Data *time series* dipakai karena data-data yang lengkap di BPS DKI Jakarta dan BAZIS DKI Jakarta hanya data tentang Propinsi DKI Jakarta secara keseluruhan. Sementara data per wilayah tidak tersedia secara lengkap, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan data panel.

3.1.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggaran belanja bidang kesra merupakan anggaran belanja pembangunan yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenagakerjaan.

2. Pendayagunaan dana ZIS merupakan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, pendayagunaan dana ZIS di-*proxy* dari pengumpulan dana ZIS.
3. PDRB per kapita merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Data tentang PDRB per kapita diperoleh dari laporan BPS DKI Jakarta.
4. Tingkat Kemiskinan diukur dengan persentase jumlah penduduk miskin per tahun yang dikeluarkan BPS DKI Jakarta tahun 1987-2002.

3.1.3 Deskripsi Data Penelitian

Tabel 3.1 di bawah ini berisi *mean*, *median*, *max*, *min*, dan *standard deviasi*. *Mean* adalah rata-rata data. *Median* adalah nilai tengah atau rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap. *Maximum* dan *Minimum* adalah nilai paling besar dan nilai paling kecil dari data. *Standard deviasi* adalah ukuran dispersi atau penyebaran data.

Tabel 3.1

Mean, Median, Maximum, Minimum, dan Standard Deviasi

	Pendmis	Kesra	ZIS	PDRB
Mean	529025.0	2.59E+11	5.81E+09	4885321.
Median	514800.0	1.54E+11	6.67E+09	6807259.
Maximum	974000.0	1.06E+12	1.16E+10	8393272.
Minimum	181200.0	3.93E+10	8.65E+08	1410009.
Std. Dev	250037.8	2.80E+11	3.65E+09	2952278.
Observations	16	16	16	16

Sumber: Data diolah.

Tabel 3.2 di bawah ini merupakan kumpulan data-data yang akan menjadi bahan penelitian, terdiri dari persentase penduduk miskin, anggaran belanja bidang kesra, dana ZIS, dan PDRB per kapita harga konstan.

Tabel 3.2
Total Anggaran Belanja Bidang Kesra Propinsi DKI Jakarta
Tahun 1987-2002

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Total Anggaran Bidang Kesra (dalam ribuan)	Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)	PDRB Per Kapita Harga Konstan
1987	10,57	87.192.204	Rp. 865 juta	1.410.009
1988	9,23	62.289.003	Rp. 884 juta	1.468.039
1989	7,96	81.636.552	Rp. 1.235 juta	1.573.375
1990	7,33	124.263.342	Rp. 1.838 juta	1.668.447
1991	6,92	92.299.075	Rp. 2.960 juta	1.759.911
1992	6,48	109.324.320	Rp. 3.250 juta	1.874.158
1993	6,04	133.676.733	Rp. 4.352 juta	1.992.092
1994	4,96	173.924.337	Rp. 6.759 juta	6.731.196
1995	3,87	218.903.322	Rp. 6.576 juta	7.343.197
1996	2,80	350.613.757	Rp. 8.944 juta	7.998.277
1997	2,19	289.568.165	Rp. 10.967 juta	8.393.272
1998	10,37	39.310.476	Rp. 6.762 juta	6.914.252
1999	11,76	234.454.602	Rp. 8.122 juta	6.883.322
2000	3,40	307.626.893	Rp. 8.416 juta	7.118.649
2001	2,94	785.591.018	Rp. 9.482 juta	7.376.702
2002	3,43	1.060.055.400	Rp. 11.554 juta	7.661.236

Sumber: BPS Propinsi DKI Jakarta dan BAZIS DKI Jakarta, diolah.

3.2 Metodologi untuk Pemecahan Masalah

3.2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu tentang anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita DKI Jakarta. Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, tentang bagaimana pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta?.

3.2.2 Teknik Analisis

Teknik analisis kuantitatif yang dipakai untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel dependen (terikat) dengan beberapa (baca: lebih dari satu) variabel independen (bebas). Hubungan tersebut diekspresikan dalam bentuk persamaan yang menghubungkan variabel terikat Y dengan dua atau lebih variabel bebas X_1, X_2, \dots, X_n . Hasil dari analisis tersebut disebut model regresi linier berganda, yang modelnya dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \varepsilon_i \quad (3.1)$$

Dimana : $i = 1, 2, 3, \dots, N$ (banyaknya observasi)

Dalam konteks penelitian ini, analisis regresi berganda dipakai untuk mengetahui hubungan antara variabel jumlah penduduk miskin sebagai variabel dependen dengan variabel anggaran belanja sektor kesejahteraan, PDRB Perkapita, dan ZIS sebagai variabel independen. Hubungan keempat variabel tersebut dapat ditulis dalam model sebagai berikut:

$$TM = \alpha + \beta_1 KESRA + \beta_2 ZIS + \beta_3 PDRB + \varepsilon_i \quad (3.2)$$

Dimana :

TM	= Tingkat Kemiskinan
α	= Intercept atau konstanta
$\beta_{1,2}$	= Koefisien regresi
KESRA	= Anggaran Belanja Bidang Kesra
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto per kapita harga konstan
ZIS	= Pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah
ε_i	= Standar error

Persamaan (3.2) di atas merupakan persamaan uji faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk kemudahan menghindari terjadinya masalah-masalah yang sering timbul dalam regresi *ordinary least square*, maka dilakukan transformasi data ke dalam bentuk *natural logaritma* (Ln). Transformasi data ke dalam bentuk Ln ini terutama dikarenakan ada perbedaan satuan diantara variabel-variabel. Variabel terikat satuannya adalah persen, sementara variabel-variabel bebas satuannya adalah nominal rupiah. Perbedaan satuan data ini akan menyulitkan dalam menginterpretasikan model yang akan terbentuk, sehingga perlu dilakukan transformasi ke dalam bentuk Ln. Sehingga persamaan regresinya berubah menjadi:

$$\ln TM = \alpha + \beta_1 \ln KESRA + \beta_2 \ln ZIS + \beta_3 \ln PDRB + \varepsilon_t \quad (3.3)$$

Dimana :

- $\ln TM$ = Tingkat Kemiskinan dalam logaritma natural
- α = Intercept atau konstanta
- $\beta_{1,2}$ = Koefisien regresi
- $\ln KESRA$ = Anggaran Belanja Bidang Kesejahteraan dalam logaritma natural
- $\ln PDRB$ = Produk Domestik Regional Bruto Perkapita dalam logaritma natural
- $\ln ZIS$ = Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam logaritma natural
- ε_t = Standar error

Dikarenakan variabel terikat, dalam hal ini tingkat kemiskinan pada periode t , tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel independen (KESRA, ZIS, dan PDRB) pada periode t saja, namun juga dipengaruhi periode-periode sebelumnya (dalam penelitian ini digunakan 1 bulan sebelumnya) maka *digunakan model distributed lag*. Dengan demikian model/persamaan dengan *lag* 1 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\ln TM_t = \alpha + \beta_1 \ln KESRA_{t-1} + \beta_2 \ln ZIS_{t-1} + \beta_3 \ln PDRB_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3.4)$$

Dimana:

t = periode sekarang

t-1 = periode sebelumnya

Analisis regresi berganda mensyaratkan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut memiliki sifat BLUE (*best linear unbiased estimator*) yang sesuai dengan teorema Gauss-Markov. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. $E u_i = 0$. Error variabel-variabel lain yang mempengaruhi Y_i , tetapi tidak terwakili di dalam model harus sama dengan 0 (nol).
2. $Cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, i \neq j$. Asumsi ini dikenal sebagai asumsi berurutan atau tidak ada korelasi.
3. $Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$, untuk setiap i . asumsi ini dikenal sebagai asumsi homoskedastisitas atau varians sama
4. $Cov(\varepsilon_i | X_{2i}) = Cov(\varepsilon_i | X_{3i}) = 0$. Artinya, kesalahan pengganggu ε_i dan variabel bebas X tidak berkorelasi
5. Tidak ada multikolinieritas atau tidak ada hubungan linier diantara variabel bebas. (Firdaus : 2004)
6. Model regresi dispesifikasi secara benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat model adalah harus sesuai dengan teori, variabel-variabel apa saja yang perlu diperhatikan, dan bagaimana bentuk fungsinya.

Asumsi-asumsi di atas digunakan sebagai syarat agar model dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Namun tidak jarang model menghadapi masalah-masalah yang sering muncul dalam analisis regresi. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel independent. Dengan kata lain ada hubungan linier yang eksak/pasti diantara atau semua variabel bebas. Multikolinieritas hanya mungkin terjadi dalam regresi berganda.

Multikolinieritas dapat mengakibatkan koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan (*interminate*) dan standard error-nya tak terhingga (*infinite*). Jika kolinieritas kurang sempurna walaupun koefisien regresi dari variabel bebas dapat ditentukan (*determinate*), tetapi standar error-nya tinggi, yang berarti koefisien regresi tidak dapat diperkirakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi semakin kecil korelasi antara variabel bebasnya maka semakin baik model regresi yang akan diperoleh.

Beberapa ciri bahwa suatu model memiliki penyakit multikolinieritas adalah (Nachrowi dan Usman, 2002) ;

- a. memiliki variansi dan standard error yang besar
- b. R^2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t
- c. Hasil taksiran dari koefisien terkadang tidak sesuai dengan substansi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan

Salah satu teknik yang mudah untuk mendeteksi masalah multikolinieritas adalah dengan melihat korelasi antara kedua variabel bebas melalui tabel output *Correlation Matrix* program Eviews. Korelasi dikatakan kuat jika nilainya $> 0,8$, sehingga patut diduga bahwa antar variabel bebas terjadi multikolinieritas.

Cara lain mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) program SPSS, yaitu dengan rumus sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2} \quad (3.5)$$

R^2 = Koefisien determinasi antar variabel bebas dengan variabel terikat.

Apabila menggunakan $\alpha \approx 5\%$ berarti nilai VIF harus kurang dari 5. apabila lebih besar dari 5 patut dicurigai adanya hubungan linier antar variabel bebas.

Ada beberapa alternatif dalam menghadapi masalah multikolinieritas. Alternatif tersebut adalah:

1. Mencari data tambahan, karena masalah multikolinier biasanya muncul karena jumlah observasinya sedikit.
2. Menghilangkan salah satu variabel yang kolinier, terutama yang memiliki hubungan kolinier yang kuat dengan variabel lain.

3. Transformasikan salah satu (beberapa) variabel, termasuk misalnya dengan melakukan diferensi.

2. Heteroskedastis

Salah satu asumsi lain yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat BLUE maka $var(u_i)$ harus sama dengan σ^2 (konstan) atau dengan kata lain, semua residual atau *error* mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti itu disebut dengan homoskedastis. Sedangkan bila varian tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastis. Model regresi yang baik harus terhindar dari heteroskedastis (Nachrowi dan Hardius, 2006)

Untuk mengetahui apakah suatu data bersifat heteroskedastis atau tidak perlu dilakukan pengujian. Pengujian heteroskedastis untuk penelitian ini menggunakan *white heteroscedasticity (no cross term)* dengan bantuan *eviews 4*. Jika pada output *white heteroscedasticity* nilai probabilitasnya < dari $\alpha = 5\%$ maka datanya homosekedastis.

3. Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya. Meskipun demikian, tetap dimungkinkan autokorelasi dijumpai pada data yang bersifat *cross sectio* (Winarno, 2007)

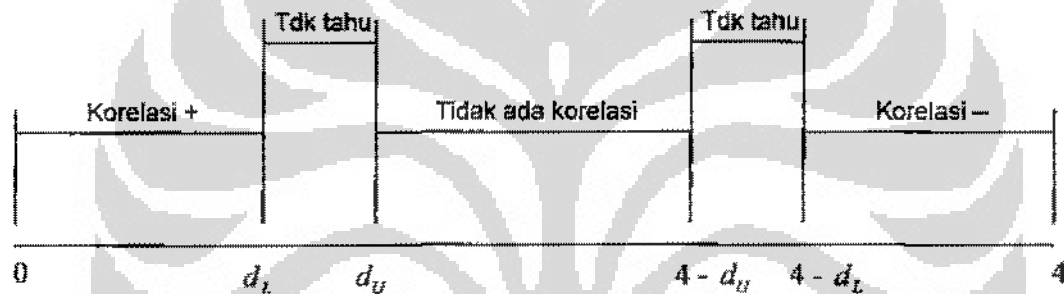
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lain. Dalam menentukan ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan nilai *Durbin Watson (DW)* untuk dibandingkan antara d_{tabel} dan d_{hitung} . Nilai d_{hitung} diperoleh dari output regresi. Sedangkan nilai d_{tabel} diperoleh dari tabel *Durbin Watson Statistic* berupa nilai d_L (d_{lower}) dan d_U (d_{Upper}).

Untuk uji DW ini dapat dibuat batasan daerah penolakan secara praktis, yaitu jika nilai d dekat dengan 2 maka tidak ada korelasi dalam suatu variabel. Untuk uji yang spesifik aturannya adalah sebagai berikut : (Nachrowi dan Hardius, 2002)

- Bila $DW < d_L \Rightarrow$ Tolak H_0 , berarti ada korelasi positif atau kecenderungannya $\rho = 1$
- Bila $d_L \leq DW \leq d_U \Rightarrow$ Tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa
- Bila $d_U < DW < 4 - d_U \Rightarrow$ Tidak ada alasan untuk menolak H_0 . Artinya tidak ada korelasi positif maupun negatif
- Bila $4 - d_U \leq DW \leq 4 - d_L \Rightarrow$ Tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.
- Bila $DW > 4 - d_L \Rightarrow$ Tolak H_0 , berarti ada korelasi positif

Gambar 3.1

Aturan membandingkan Uji DW dengan Tabel DW



Kesulitan utama pada uji DW adalah terdapat interval "tidak tahu", yang tidak memberikan keputusan yang tegas (tidak konklusif) dan biasa jangkauan interval ini cukup besar. Dengan demikian akan dihadapi risiko besar untuk membuat keputusan yang salah, yaitu kasus-kasus yang seharusnya mengandung otokorelasi dinyatakan sebagai kasus yang tidak konklusif, jadi karena tidak secara nyata mengandung otokorelasi maka model itu dapat diterima.

Mendeteksi problem autokorelasi bisa juga menggunakan *Uji Lagrange-Multiplier* (Uji LM). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai $Obs \cdot R\text{-squared}$ dan nilai Probability-nya pada tabel *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test* hasil program Eviews. Ketentuannya adalah bila nilai probabiliti $> 5\%$, berarti tidak ada autokorelasi. Sementara bila nilai probabiliti $< 5\%$, berarti mengandung masalah autokorelasi.

3.3. Pengujian Hipotesis

3.3.1. Uji-F (Uji model)

Uji-F merupakan suatu pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yang digunakan.

Adapun langkah-langkah dalam uji ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0: \alpha = 0$, artinya secara bersama-sama variabel *independent* tidak berpengaruh signifikan secara statistik antara terhadap variabel *dependent*

$H_0: \alpha \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel *independent* berpengaruh signifikan secara statistik antara terhadap variabel *dependent*

2. Menentukan tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% dan *degree of freedom* (df) = $n-k$ dalam menentukan t-tabel.

3. Menghitung F-hitung

4. Menetapkan kriteria pengujian.

Ho ditolak apabila: $F\text{-hit} > F\text{-tabel}$

Ho diterima apabila: $F\text{-hit} < F\text{-tabel}$

4. Kesimpulan yang didasarkan pada hasil langkah ketiga di atas.

3.3.2 Uji-t (Uji masing-masing variabel)

Uji-t merupakan suatu pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat yang digunakan. Adapun langkah-langkah dalam uji ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0: \alpha = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara statistik antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

$H_0: \alpha \neq 0$, artinya ada pengaruh signifikan secara statistik antara variabel terhadap bebas variabel terikat.

2. Menghitung tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% dan *degree of freedom* (df) = $n-k$ dalam menentukan t-tabel.

3. Menghitung t-hitung

4. Menetapkan kriteria pengujian.

Ho ditolak apabila: $t\text{-hit} > t\text{-tabel} / -t\text{ hit} < -t\text{-tabel}$

Ho diterima apabila: $t\text{-hit} < t\text{-tabel} / -t\text{ hit} > -t\text{-tabel}$

5. Kesimpulan yang didasarkan pada hasil langkah ketiga di atas.

3.3 Definisi Operasional

- Nilai TM = Diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pusat dan DKI Jakarta. Nilai ini merupakan persentase dari perbandingan antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk DKI Jakarta.
- Nilai KESRA = Diperoleh dari laporan BAPPEDA DKI Jakarta dan BPS DKI Jakarta. Nilai ini merupakan total dari anggaran belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan.
- Nilai ZIS = Diperoleh dari BAZIS DKI Jakarta. Variabel ZIS ini merupakan *proxy* dari pengumpulan dana ZIS.
- Nilai PDRB Per Kapita = Diperoleh dari publikasi BPS. Nilai PDRB per kapita yang dipakai adalah PDRB per kapita harga konstan

3.4 Deskripsi Objek Penelitian

Kedudukannya yang khas baik sebagai ibukota negara maupun sebagai ibukota daerah swatantra, menjadikan Jakarta istimewa dan berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Karena fungsi yang diembannya sebagai pusat pemerintahan dan lebih dari 70% peredaran uang berada di Jakarta, menimbulkan konsekuensi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, kesehatan, dan olahraga.

Pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan selama periode 2001-2005. Pendapatan per kapita penduduk Jakarta pada tahun 2001 sebesar 31,12 juta meningkat menjadi 35,17 juta pada tahun 2002 dan 38,90 juta pada tahun 2003, yang kemudian naik kembali menjadi 43,33 juta pada tahun 2004 dan 49,92 juta pada tahun 2005.

Data terakhir BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pendapatan yang diterima kelompok pendapatan rendah pada tahun 2006 sekitar 20,11%, sedangkan pendapatan yang diterima kelompok pendapatan tinggi sebesar 49,00%. Kondisi ini lebih baik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketimpangan pendapatan penduduk melalui Gini Ratio selama periode 1990-2006 memperlihatkan kesenjangan yang membesar dari 0,305 tahun 1990 menjadi 0,360 tahun 2006.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan relatif besar (mendekati 50%) dari total pengeluaran rumah tangga. Pada tahun 2006 pola pengeluaran per kapita masyarakat DKI Jakarta adalah 36,42% untuk makanan dan 63,58% untuk non makanan. Persentase pengeluaran non makanan pada tahun 2006 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan semakin tinggi pendapatan masyarakat di DKI Jakarta atau dengan kata lain masyarakat di DKI Jakarta mengalami peningkatan kesejahteraan.

Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km² dan lautan seluas 6.977,5 km² serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km²; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km²; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km²; Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km² dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu. Gambaran mengenai Kodya-kodya di DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Kodya Jakarta Pusat

Posisi Jakarta Pusat berada tepat di jantung Ibukota Republik Indonesia, Jakarta. Wilayah Jakarta Pusat dibatasi oleh Jakarta Utara dan Jakarta Barat di sebelah utara, sebelah Timur dibatasi oleh Jakarta Timur, sebelah Selatan dibatasi oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, sebelah Barat dibatasi oleh Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Jakarta Pusat merupakan satu dari lima wilayah kotamadya di DKI Jakarta yang kedudukannya disetarakan dengan Daerah Tingkat II lainnya. Sebagai

bagian pusat ibukota Indonesia, wilayah Jakarta Pusat mempunyai kekhususan, antara lain pusat pemerintahan nasional, pusat keuangan dan bisnis.

Jakarta Pusat dibagi habis oleh 8 kecamatan dan 44 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 380 RW dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 4.586 RT. Jakarta Pusat penduduknya dari tahun ke tahun cenderung menurun. Hal ini disebabkan adanya upaya pemerintah DKI Jakarta untuk pengembangan Jakarta ke wilayah timur dan barat. Akan tetapi akhir-akhir ini dengan dibangunnya rumah-rumah susun pada daerah kumuh kemungkinan adanya peningkatan jumlah penduduk.

BAZIS Kodya Jakarta Pusat beralamat di Jl. Tanah Abang 1 No. 1 Jakarta Pusat. Hasil pengumpulan ZIS Kodya Jakarta Pusat Tahun 2007 periode 2 Januari s.d 27 Desember mencapai dana sebesar Rp. 2.343.678.405,-. Pelaksana BAZIS Kodya Jakpus telah melaksanakan penyaluran pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS tahun 2006 dari BAZIS Provinsi DKI Jakarta kepada yang berhak menerimanya, meliputi bantuan sabilillah, santunan guru ngaji/merbot, guru madrasah honorer, bantuan biaya pendidikan SD/MI dan MTs/SMP.

2. Kodya Jakarta Utara

Wilayah kotamadya Jakarta Utara mempunyai luas 7.133,51 Km², terdiri dari luas lautan 6.979,4 Km² dan luas daratan 154,11 Km². Daratan Jakarta Utara membentang dari Barat ke Timur sepanjang kurang lebih 35 km, menjorok ke darat antara 4 s/d 10 km, dengan kurang lebih 110 pulau yang ada di Kep. Seribu. Ketinggian dari permukaan laut antara 0 s/d 20 meter, dari tempat tertentu ada yang dibawah permukaan laut yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa/empang air payau. Wilayah Kotamadya Jakarta Utara merupakan pantai beriklim panas, dengan suhu rata-rata 27^oC, curah hujan setiap tahun rata-rata 142,54 mm dengan maksimal curah hujan pada bulan September.

Volume ekspor melalui pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara pada tahun 2000 mencapai 2.509.305 ton, turun 47,59 persen dibandingkan dengan tahun 1999. Sementara itu nilai impor meningkat 73,03 persen, yaitu dari 9.076.263.827 US\$ pada tahun 1999 menjadi 15.637.198.378 US\$ pada tahun 2000.

Jumlah industri besar/ sedang di Jakarta Utara pada tahun 2000 mengalami peningkatan dibanding tahun 1999 yaitu dari 952 pada tahun 1999 menjadi 996 pada tahun 2000. Demikian pula dengan penyerapan tenaga kerja dimana pada tahun 1999 sebesar 180.023 orang meningkat menjadi 191.467 orang tahun 2000.

BAZIS Kodya Jakarta Utara beralamat di Jl. Laksda Yos Sudaro No. 27-29 Tanjung Priok. Realisasi pengumpulan ZIS tahun 2007 mencapai Rp. 2.154.471.300,- dan bila dibandingkan dengan hasil tahun 2006 sebesar Rp. 1.451.583.500,- terdapat kenaikan sebesar Rp. 702.887.500,- (48%).

3. Kodya Jakarta Barat

Wilayah Kotamadya Jakarta Barat dibatasi oleh wilayah sebagai berikut: Sebelah Selatan : Kotamadya Jakarta Selatan dan Kabupaten / Kodya Tangerang, Sebelah Barat : Kabupaten dan Kotamadya Tangerang, Sebelah Timur : Kotamadya Jakarta Utara dan Kotamadya Jakarta Pusat, sedangkan Sebelah Utara : Kabupaten / Kodya Tangerang dan Kodya Jakarta Utara. Wilayah ini secara administratif terbagi menjadi 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 127,11 Km².

Berdasarkan data yang ada pada Sudin Perindustrian Wilayah Kotamadya Jakarta Barat, industri yang berkembang di wilayah Jakarta Barat merupakan industri kecil yang terdiri dari industri hasil pertanian dan kehutanan, industri kimia, industri aneka, serta industri logam, mesin dan elektronika. Sentra-sentra industri kecil juga terdapat di seluruh wilayah Jakarta Barat, dan terdapat kurang lebih 12 sentra lainnya. Selain itu juga telah direncanakan untuk mengarahkan pengembangan kawasan industri di Kapuk dan Kalideres untuk menampung kegiatan industri yang bukan pada peruntukkannya. Prosentase luas kawasan industri dan pergudangan ditargetkan sebesar 0,86 % dari luas Kota Jakarta.

BAZIS Kodya Jakarta Barat beralamat di Jl. Raya Kembangan No. 02. Hasil pengumpulan ZIS tahun 2007 mencapai dana sebesar Rp. 4.837.002.300,- dan sebagai pengumpul ZIS tertinggi no. 2 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Pendayagunaan ZIS diberikan kepada yang berhak meliputi bantuan sabilillah, santunan guru ngaji, guru madrasah honorer, santunan wajib belajar, dan santunan yatim-piatu.

4. Kodya Jakarta Selatan

Jakarta Selatan secara administratif terbagi menjadi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan. Bagian dari wilayah Jakarta Selatan ini pada masa awal kemerdekaan direncanakan sebagai Kota Satelit (Kebayoran Baru), konsep dengan alusi oriental yang ditandai dengan empat jalan utama yang menyebar dari satu pusat persis ke empat penjuru dan mengintegrasikan rumah-rumah besar dengan rumah-rumah kecil di dalam setiap blok: yang besar di luar, di tepi jalan besar, yang lebih kecil di dalam, mengelilingi taman lingkungan itu kini mulai penuh sesak. Selain itu, bagian wilayah ini juga menjadi penyangga air tanah ibukota yang nasibnya kini mengenaskan karena banyaknya bangunan dan mulai menyurutnya ruang-ruang terbuka hijau. Selain itu, kawasan selatan ini juga mulai tumbuh sebagai pusat perbelanjaan, di samping perumahan yang banyak diminati warga kota.

Dalam pengembangan industri, Kotamadya Jakarta Selatan mengembangkan industri kecil yang tidak berpolusi dan berwawasan lingkungan hidup. Selain itu juga terdapat sentra-sentra industri yang terdiri dari berbagai macam komoditi seperti sandang, pangan, kerajinan (mebel, kusen), sepatu/sandal, serta juga berbagai macam kue basah dan kue kering. Prosentase luas kawasan industri selektif dan pergudangan ditargetkan sebesar 0,01% dari luas Kota Jakarta.

BAZIS Kodya Jakarta Selatan beralamat di Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Target pengumpulan ZIS tahun 2007 sebesar Rp. 4.200.000.000,- dan terealisasi sampai dengan tanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 5.517.941.033,-. Seksi pengumpulan ZIS memasyarakatkan ZIS melalui peranan pemerintah yang dimotori oleh Walikota Jakarta Selatan di setiap pertemuan dengan menghimbau kepada pimpinan unit, pegawai, alim ulama, tokoh masyarakat untuk berperan aktif, sehingga hasil pengumpulan ZIS dapat meningkat dan pada akhirnya dapat membantu dalam ikut mengentaskan kemiskinan.

5. Kodya Jakarta Timur

Wilayah Jakarta Timur terdiri 95 % daratan dan selebihnya rawa atau persawahan dengan ketinggian rata-rata 50 m dari permukaan air laut serta dilewati oleh beberapa sungai kanal antara lain : Cakung Drain, Kali Ciliwung,

Kali Malang, Kali Sunter, Kali Cipinang. Kotamadya Jakarta Timur mempunyai potensi pengembangan disektor industri, terlihat dengan adanya beberapa pertumbuhan kawasan industri antara lain : PT. Jiep, Gandaria, Pasar Rebo, PIK Pengilingan, SUIK Pulogadung. Tahun 1999 jumlah industri terdiri dari PMA 95, Swasta Nasional 172, Industri kecil 2274 unit (Terdiri dari 92 kecil formil, 2182 non formal). Pengembangan sub sektor perdagangan di arahkan, untuk memperlancar arus barang jasa, penyediaan kebutuhan pokok, dengan harga layak.

BAZIS Kodya Jakarta Timur terletak di Jl. Sentra Primer Baru Timur Jakarta 13950. Hasil pengumpulan ZIS pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 67,34 persen jika dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2007 terkumpul sebesar Rp. 3.890.014.450,- sedangkan pada tahun 2006 yang lalu jumlahnya hanya Rp. 2.619.542.050,-. Hasil pengumpulan ZIS tersebut didayagunakan kepada mustahik sesuai tuntunan syariat islam, yaitu kepada 8 asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan dana infaq dan shadaqah didayagunakan untuk bantuan kegiatan kemaslahatan umat.

6. Kepulauan Seribu

Kawasan yang letaknya 45 km sebelah utara Jakarta ini mempunyai nilai konservasi yang tinggi karena keanekaragaman jenis dan ekosistemnya yang unik dan khas. Kepulauan Seribu mempunyai luas wilayah 1.180,80 ha (11,80 km²) dengan jumlah penduduk 15.600 jiwa, terdiri 105 pulau yang tersebar dalam 4 kelurahan. Kondisi sumberdaya alam tersebut menyimpan potensi, terutama di sektor perikanan dan sektor pariwisata.

Penangkapan ikan di Kepulauan Seribu merupakan salah satu mata pencarian utama nelayan setempat. Produksi perikanan laut dan hasil tangkapan lokal pada tahun 2000 di wilayah Jakarta Utara 57.260.269 kg dengan nilai sebesar Rp.97.267.048.675,-. Hal ini mengalami penurunan produksi jika dibandingkan dengan pada tahun 1999 sebesar 63.091.645 kg. Dengan penurunan sebesar 5.831.136 kg atau turun sebesar 9,2%. Penurunan produksi tersebut disebabkan karena terjadinya over fishing penangkapan di perairan Teluk Jakarta yang diakibatkan padatnya armada perikanan yang beroperasi.

3.5 Tahapan Penyelesaian Masalah

Tahapan penelitian di dalam tesis ini dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Kerangka Teori

Tahapan ini dilakukan melalui studi literatur untuk mencari pengaruh pendayagunaan dana ZIS dan anggaran pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan.

2. Membuat model dan menterjemahkannya dalam persamaan struktural.

3. Melakukan estimasi model (pengolahan data) dengan program Eviews dan didukung program SPSS dan Excel.

4. Melakukan penilaian hasil estimasi berdasarkan asumsi BLUE.

5. Melakukan uji *goodnes-of-fit*, uji-t, dan uji-F .

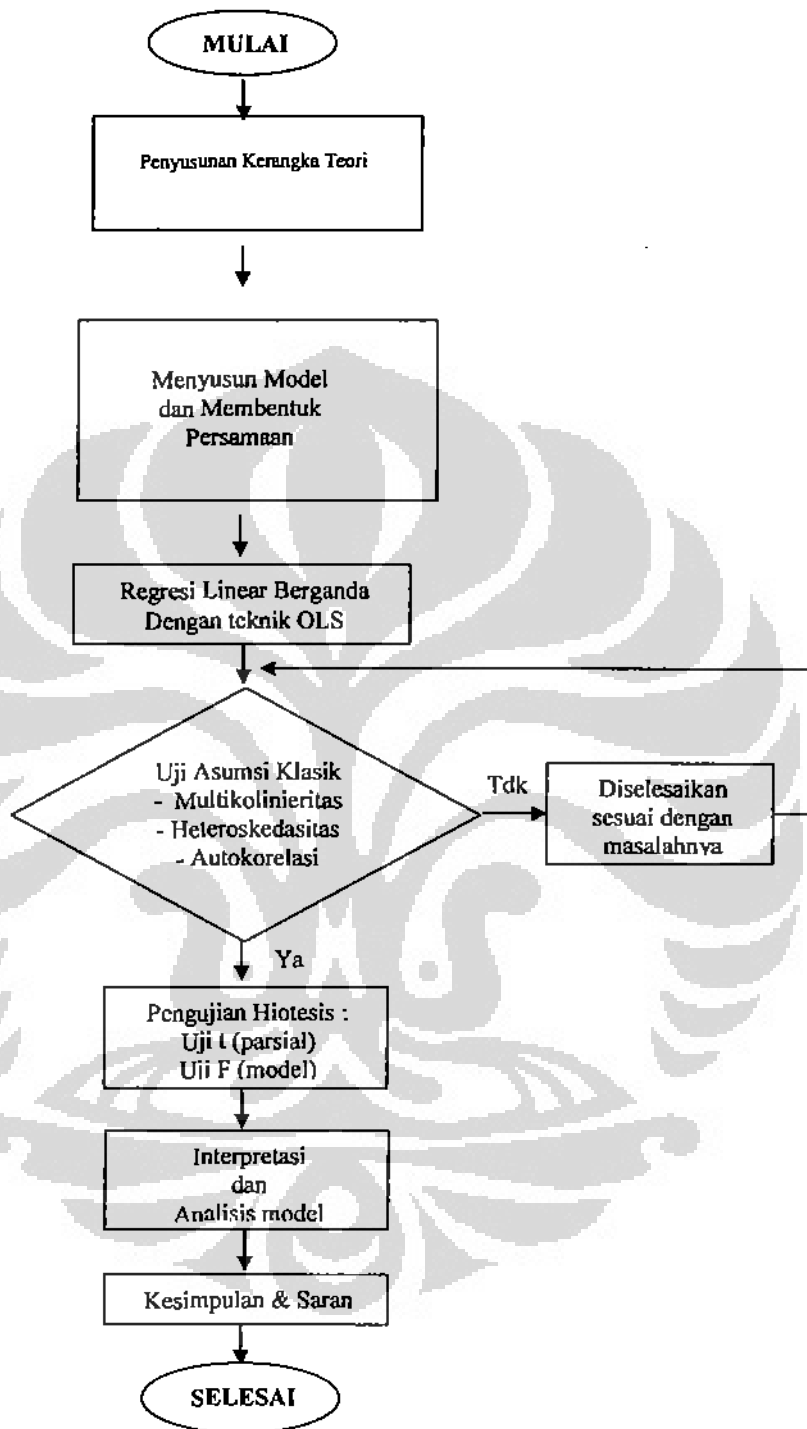
6. Interpretasi model

7. Kesimpulan dan saran

3.6. Flow Chart Tahap Penyelesaian Masalah

Tahapan penelitian di dalam tesis ini secara keseluruhan digambarkan dalam diagram berikut

Gambar 3.2
Flow Chart Tahap Penyelesaian Masalah



BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENYELESAIAN MASALAH

Bab IV ini berisi analisis terhadap data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bagian pertama diawali dengan pembahasan mengenai gambaran anggaran belanja pemerintah DKI Jakarta bidang kesejahteraan rakyat, pendayagunaan dana ZIS, dan kondisi PDRB Perkapita DKI Jakarta. Pembahasan berikutnya tentang penghitungan secara kuantitatif seberapa besar pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS dan PDRB Perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Jakarta.

4.1 Gambaran Anggaran Belanja Bidang KESRA, Pendayagunaan Dana ZIS, dan PDRB Per Kapita Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan.

Indikator yang dapat memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dapat ditinjau dari beberapa aspek diantaranya adalah aspek demografis, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh besar kecilnya anggaran belanja bidang kesejahteraan, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita.

4.1.1 Gambaran Anggaran Belanja Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan.

Dana yang diperoleh Pemda DKI Jakarta secara garis besar dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin ditujukan untuk membiayai operasional penyelenggaraan roda pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengeluaran pembangunan merupakan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi.

Tabel 4.1 menunjukkan realisasi belanja pada tahun 2000 sampai tahun 2002 yang terus mengalami peningkatan. Kenaikan cukup besar terjadi pada tahun 2000 ke tahun 2001 lebih dari 100 persen. Kenaikan pada tahun 2001-2002 terjadi pada hampir seluruh pengeluaran baik belanja rutin maupun belanja

pembangunan. Belanja rutin mengalami penurunan pada kegiatan-kegiatan perjalanan dinas, angsuran pinjaman hutang dan bunga, serta pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.

Tabel 4.1
Realisasi Belanja Rutin Provinsi DKI Jakarta Tahun 2000-2002
(dalam jutaan)

Jenis Pengeluaran	2000	2001	2002
Belanja Rutin	2.194.545	4.661.818	5.403.244
1. Belanja Pegawai	803.360	2.057.422	2.232.998
2. Belanja Barang	511.426	997.664	1.252.863
3. Biaya Pemeliharaan	409.100	818.834	940.841
4. Belanja Perjalanan Dinas	17.497	13.384	5.544
5. Belanja lain-lain	210.644	324.750	406.382
6. Angsuran Pinjaman Hutang & Bunga	73.151	94.900	92.038
7. Ganjaran/subsidi/sumbangan	27.428	103.632	109.566
8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian	121.992	230.034	154.885
9. Pengeluaran tidak tersangka	19.959	21.218	208.127
Belanja Pembangunan	932.810	2.194.883	3.152.892
Jumlah	3.127.364	6.856.701	8.556.136

Sumber: Biro Keuangan Pemda DKI Jakarta dalam *Statistik Jakarta 2002*.

Belanja rutin dalam struktur pengeluaran masih dominan bila dibandingkan dengan belanja pembangunan. Dari kontribusi belanja rutin ini dapat dilihat kondisi suatu daerah, apabila kontribusinya makin kecil dapat diindikasikan bahwa daerah itu maju, karena hanya memerlukan sedikit dananya untuk membiayai pengeluaran rutin, selebihnya digunakan untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian, DKI Jakarta termasuk daerah maju karena kontribusi pengeluaran rutin yang terus mengecil atau menurun pada tahun 2000-2002.

Tabel 4.2
Realisasi Pengeluaran Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2000-2002

Sektor Pengeluaran	2000	2001	2002
1. Industri	6.775	23.420	23.677
2. Pertanian dan Kehutanan	25.714	41.071	65.285
3. Sumber daya dan Irigasi	24.722	89.789	267.271
4. Tenaga Kerja	8.193	12.730	22.066
5. Perdagangan, Pengembangan Usaha daerah, Keuangan daerah, dan koperasi	29.677	128.511	150.110
6. Transportasi	106.968	225.635	339.741
7. Pertambangan dan energi	-	-	-
8. Pariwisata dan Telekomunikasi	18.929	28.316	62.851
9. Pembangunan daerah dan permukiman	111.493	382.547	395.987
10. Lingkungan hidup & tata ruang	108.895	172.260	187.082
11. Pendidikan dan Kebudayaan nasional, pemuda dan Olah Raga	125.379	366.491	533.765
12. Kependudukan & Keluarga Sejahtera	3.975	9.705	27.473
13. Kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak Dan remaja	119.180	303.153	350.220
14. Perumahan dan permukiman	54.874	103.217	134.005
15. Agama,	13.015	31.279	142.864
16. Ilmu Pengetahuan & Teknologi	19.142	29.622	42.695
17. Hukum	3.905	6.171	21.064
18. Aparatur pemerintah & pengawasan	127.015	184.866	287.020
19. Politik, Pnerangan dan Komunikasi & media Massa	5.605	11.839	21.064
20. Keamanan dan Ketertiban Umum	19.364	44.253	69.750
21. Subsidi	-	-	-
Jumlah	932.810	2.194.883	3.152.892

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Dalam struktur pengeluaran rutin, peranan belanja pegawai sangat dominan, pada anggaran 2001 belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan akibat adanya peralihan pegawai negeri dari pemerintah pusat. Belanja

pegawai tahun 2000 hanya sebesar Rp. 803,360 juta meningkat menjadi Rp. 2.057.422 juta pada tahun 2001.

Dalam struktur APBD pengeluaran pembangunan dibagi dalam dua puluh satu jenis sektor. Dari dua puluh satu sektor tersebut yang merupakan sektor prioritas Pemda DKI Jakarta adalah sektor transportasi, sektor pembangunan daerah dan pemukiman, sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor aparatur pemerintah dan pengawasan, hal ini dilihat dari besarnya dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut.

Kondisi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya adalah aspek demografis, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan, serta pengeluaran rumah tangga. Indikator-indikator tersebut sangat menentukan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Oleh Karena itu, Pemda DKI Jakarta selalu mengalokasikan anggaran dalam APBD bagi sektor-sektor yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Perbaikan indikator kesejahteraan dipengaruhi oleh besar kecilnya anggaran yang diperuntukkan bagi setiap sektor belanja rutin dan pembangunan terhadap bidang kesejahteraan.

Tabel 4.3 menunjukkan perbandingan anggaran belanja Pemda DKI Jakarta yang dialokasikan bagi pengeluaran rutin, seperti pembayaran gaji pegawai dan biaya operasional rutin lainnya dengan anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesejahteraan rakyat. Anggaran belanja bidang kesra merupakan jumlah total dari anggaran bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, dan tenaga kerja. Pada Tahun 1988 perkembangan anggaran bidang kesra mengalami penurunan hingga 28,56 persen dibanding dengan tahun sebelumnya atau hanya sebesar Rp. 62,2 milyar. Hal ini berbeda dengan peningkatan anggaran belanja pembangunan dan rutin hingga 2,56 persen atau sebesar Rp. 466 milyar lebih.

Pada tahun 1999 hingga tahun 2001 perubahan jumlah anggaran bidang kesra mengalami peningkatan yang cukup besar melebihi persentase perubahan kenaikan jumlah anggaran belanja pembangunan dan rutin. Pada tahun 1999 peningkatan jumlah anggaran bidang kesra terbesar selama periode pengamatan hingga 496,4 persen atau dengan jumlah anggaran kesra sebesar Rp. 234 milyar. Dibandingkan dengan anggaran bidang kesra, pada tahun 1999 anggaran belanja

rutin dan pembangunan hanya mengalami peningkatan 90,5 persen dari tahun sebelumnya atau dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.434 milyar.

Tabel 4.3.
Perbandingan Perubahan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan

Tahun	Belanja Rutin dan Pembangunan (Ribuan Rp)	Perubahan Belanja (R+P) (%)	Total Kesra (Ribuan Rp)	Perubahan Kesra (%)
1987	454.370.703	-	87.192.204	-
1988	466.015.315	2,56	62.289.003	(28,56)
1989	650.407.522	39,56	81.636.552	31,06
1990	962.463.903	47,97	124.263.342	52,2
1991	1.120.069.062	16,37	92.299.075	(25,72)
1992	1.130.731.306	0,95	109.324.320	18,44
1993	1.476.521.283	30,58	133.676.733	22,27
1994	1.847.938.699	25,15	173.924.337	30,11
1995	2.404.720.799	30,13	218.903.522	25,86
1996	2.835.833.821	17,93	350.613.757	60,17
1997	2.981.385.635	5,13	289.568.165	(17,41)
1998	1.802.068.900	(39,5)	39.310.476	(86,4)
1999	3.434.601.100	90,5	234.454.602	496,4
2000	3.127.364.200	8,95	307.626.893	31,21
2001	6.856.700.184	119,25	785.591.018	155,37
2002	8.556.136.000	124,78	1.060.055.400	134,94

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 4.3 memperlihatkan performa anggaran bidang kesra mendapat perhatian yang cukup besar dari Pemda DKI Jakarta, dimana setiap tahunnya kecenderungan anggaran bidang kesra mengalami kenaikan yang cukup besar. Meski jumlah nominal anggaran bidang kesra tidak sebesar jumlah nominal anggaran bidang belanja pembangunan dan rutin. Kendati demikian, rata-rata

perkembangan jumlah anggaran bidang kesra selama periode pengamatan mengalami peningkatan sebesar 53,33 persen tiap tahunnya lebih besar dibanding rata-rata perubahan jumlah anggaran belanja pembangunan dan rutin yang meningkat hanya 28,25 persen pertahun.

4.1.2 Gambaran Pendayagunaan Dana ZIS BAZIS DKI Jakarta Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan.

Pendayagunaan dana ZIS secara tekstual ditujukan untuk 8 *ashnaf* (golongan), namun perkembangan masyarakat dan kondisi BAZIS sendiri tidak memungkinkan menyalurkan kepada 8 *ashnaf* itu. Penyaluran dan pendayagunaan ZIS di Jakarta hanya diperuntukkan bagi enam *ashnaf* dan diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup kaum *dhuafa*. Enam *ashnaf* tersebut adalah fakir, miskin, *muallaf*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa dua dari delapan *ashnaf* lainnya *riqab* (pembebasan budak) dan *amil* memerlukan kebijakan baru. Misalnya kepada *riqab* tidak ada alokasi dana lagi karena di Indonesia tidak ada perbudakan. Sedangkan hak *amil* tidak diambilkan dari dana ZIS, karena sudah ada subsidi dari APBD Pemerintah DKI Jakarta.

Enam *ashnaf* yang disebutkan di atas dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok fakir miskin, *sabilillah*, dan kelompok *muallaf*, *gharim* dan *ibnu sabil*.

Pendayagunaan kelompok fakir miskin diperuntukkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan mereka. Pendayagunaan kelompok *sabilillah* untuk pembinaan kegiatan keagamaan. Sedangkan pendayagunaan kelompok *muallaf*, *gharimin* dan *ibnssabil* diarahkan pada pembinaan akidah, pemberian bantuan pelunasan hutang bagi yang tidak mampu membayarnya, dan bantuan bagi mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Dinamika sosial masyarakat DKI Jakarta menuntut perubahan-perubahan dalam alokasi dana bagi masing-masing kelompok tersebut. Setiap tahun, persentase ZIS yang disalurkan berubah-ubah. Dan perubahan-perubahan ini terlebih dahulu dimusyawarahkan melalui Rapat Pleno Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana yang kemudian ditetapkan dengan

keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Perubahan-perubahan itu dapat dilihat pada perbedaan pendayagunaan berikut:

Tabel 4.4.
Perubahan Pendayagunaan Dana ZIS

Mustahik	Persentase Pendayagunaan			
	1996/1997	1998/1999	2004	2005
Fakir Miskin	55%	75%	68,8%	83,82%
Sabilillah	40%	22,5%	22,5%	14,70%
Muallaf, Gharim, dan Ibnu Sabil	5%	1,5%	1,5%	1,48%

Sumber: *Manajemen ZIS BAZIS DKI Jakarta, 2006.*

Pendayagunaan kelompok fakir miskin berupa bantuan biaya pendidikan dari tingkat SD/MI sampai tingkat mahasiswa. Pendayagunaan ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin melalui pendidikan. Pendayagunaan kelompok sabilillah diarahkan untuk pembinaan kegiatan keagamaan. Pendayagunaannya berupa pembangunan/renovasi tempat ibadah dan lembaga keagamaan. Sedangkan pendayagunaan sektor *muallaf-gharimin-ibnussabil* diarahkan untuk pembinaan akidah *muallaf* (pendatang baru dalam Islam) baik perorangan maupun lembaga dakwah/instansi yang mempunyai program pembinaan. Untuk bantuan *gharimin* yang diberikan kepada mereka yang terlibat hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, serta bantuan yang terkena musibah/bencana alam (kesetiakawanan sosial). Sedangkan bantuan *ibnussabil* yang diberikan kepada mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang bertujuan bukan untuk maksiat.

Perubahan dan perbedaan itu tidak lepas dari pembacaan BAZIS DKI Jakarta terhadap realitas yang ada. Dalam hal ini BAZIS selalu berpijak pada kebijakan pembangunan pemerintahan RI dan Pemda DKI Jakarta. Misalnya, kebijakan Pemda DKI tahun 1996/1997 sedang memprioritaskan pembangunan sarana dan fasilitas keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla gedung madrasah dan sejenisnya, tanpa mengabaikan kepentingan fakir miskin.

Seiring dengan krisis moneter yang berakibat pada krisis berbagai bidang pada tahun 1998/1999, maka prioritas penyaluran adalah pada kelompok miskin, yaitu sebesar 75%. Untuk penanggulangan krisis tahun 2003/2004, maka BAZIS DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pendayagunaan bagi kelompok fakir miskin menurun menjadi sebesar 68,80%, sabilillah sebesar 30,20% dan muallaf-gharim-ibnu sabil sebesar 1,00%.

Dalam dinamika yang lebih luas, dapat dinyatakan bahwa BAZIS DKI Jakarta berupaya semaksimal mungkin agar dalam kebijakan pendayagunaan dapat tepat sasaran, koordinatif dengan berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun lembaga pengelola zakat. Bagi BAZIS DKI Jakarta upaya ini tidak sulit, karena didukung posisinya sebagai salah satu unsur Pemda DKI Jakarta dan sebagai salah satu anggota Forum Zakat, sebagai tempat berkumpul dan sharing lembaga-lembaga pengelola zakat.

Sementara itu, pendayagunaan dana infak dan shadaqah diberikan berupa :

1. Bantuan kemaslahatan umat dan peningkatan SDM
 - a. Pendidikan Kader Ulama (PKU) dan Pendidikan Dirosatul Ulya (PDU).
 - b. Guru ngaji, honorer dan merbot.
 - c. Bantuan kesehatan ulama dan petugas operasional
 - d. Pembinaan mustahik dan amil
 - e. Bantuan penelitian S2 dan S3, pendidikan dan ketrampilan
 - f. Bantuan dana produktif
 - g. Bantuan buku perpustakaan RT/RW
2. Bantuan sosial keagamaan
 - a. Kegiatan ta'mir keagamaan
 - i. Bantuan safari ramadhan
 - ii. Bantuan safari syawal
 - iii. Bantuan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
 - b. Bantuan kemanusiaan
 - i. Bantuan bagi para dhuafa untuk biaya berobat, tunggakan SPP dan biaya hidup sehari-hari
 - ii. Bantuan untuk korban kebakaran dan banjir

3. Pengembangan lembaga dan pemasyarakatan ZIS

a. Sosialisasi ZIS

- i. Penerangan dan penyuluhan melalui media massa, penerbitan buku tentang zakat.
- ii. Monitoring ZIS bagi para petugas operasional
- iii. Bantuan biaya kegiatan penyaluran SWB, guru ngaji dan merbot.
- iv. Bantuan biaya kegiatan penyaluran bantuan bagi ashnaf sabilillah

b. Peningkatan profesionalisme amil

- i. Bantuan kejuaran ZIS

c. Peningkatan sarana operasional

- i. Servis dan perbaikan kendaraan operasional
- ii. Bantuan biaya pengganti uang bensin petugas operasional dan acara tutup buku

Ada dua kategori pendayagunaan ZIS di BAZIS DKI Jakarta yaitu: bantuan dan santunan. Bantuan adalah dana yang diberikan oleh BAZIS yang dipergunakan untuk kepentingan antara lain: sarana ibadah, sarana pendidikan Islam, beasiswa pendidikan, modal usaha bagi pedagang kecil dan sebagainya.

Khusus untuk bantuan modal usaha, BAZIS DKI Jakarta mengupayakan agar bantuan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam bahasa lain, bantuan harus sesuai dengan cara kebiasaan mereka mencari nafkah. Kalau mereka pedagang tradisional, maka bantuan harus sesuai dengan kondisi pedagang tradisional. Kalau mereka pedagng keliling, maka bantuan disesuaikan dengan kebutuhan pedagang keliling. Prinsipnya aspiratif, sesuai dengan potensi peminjam.

Agar bantuan produktif dapat berjalan maksimal, maka BAZIS DKI Jakarta selalu melakukan pendampingan, pemantaun, dan pembinaan. Upaya ini dilakukan dengan merekrut tenaga honorer sebagai Supervisi Program. Dengan ini, perkembangan usaha dapat dianalisa untuk dipastikan kelayakannya.

Santunan adalah pemberian dana untuk keperluan konsumtif, seperti untuk membeli makanan dan pakaian bagi fakir miskin, dan orang-orang yang ditimpa musibah.

BAZIS DKI Jakarta dalam hal ini mengusahakan agar pemohon, yang bersifat produktif maupun konsumtif, dapat memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah disosialisasikan secara formal, lewat jalur yang sudah ada, seperti jalur birokrasi. Dan juga sosialisasinya secara non formal, melalui media yang tersedia.

Agar proses pendayagunaan ini dapat berjalan, BAZIS DKI Jakarta dalam hal ini tetap secara aktif memberikan informasi kepada mereka dengan jaringan media-media, dan sistem informasi yang dimiliki. Karena disadari atau tidak, bahwa BAZIS DKI Jakarta hanyalah mediator antara muzakki dan mustahik.

Ada dua proses yang biasa dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta dalam upaya pendayagunaan ini. *Pertama*, upaya aktif. Upaya ini dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang baku. Proses ini dilakukan melalui rapat tahunan dengan melihat perkembangan peta ekonomi, sosial, dan politik masyarakat yang ada. Misalnya, pemberian bantuan kepada para pedagang tradisional, beasiswa pendidikan dan sebagainya. *Kedua*, upaya reaktif. Hal ini dilakukan pada setiap kejadian diluar kemampuan analisa kemanusiaan. Misalnya banjir, kebakaran, dan sebagainya.

Pendayagunaan bidang bina usaha produktif tugasnya menyalurkan dana ZIS untuk modal usaha produktif, membina pemanfaatan dana untuk meningkatkan usaha, dan mengurus pengembalian dana produktif. Kegiatan bidang bina usaha produktif telah menyalurkan dana kepada 1.553 orang dengan jumlah dana sebesar Rp. 1,9 milyar. Sementara tahun 2004 dan 2005 disalurkan kepada 19.458 orang dan 213 orang. Disalurkan melalui kecamatan, kelurahan, dan unit kerja dengan pola *qardhul hasan*, baik perorangan, kelompok usaha, maupun karyawan.

Pendayagunaan produktif juga melalui Program Pemberdayaan Modal Usaha bagi Pedagang Kecil (PPMUPK) di pasar tradisional dengan pola *mudharabah*. Sejak tahun 1999 s/d 2002 dana yang bergulir dalam program tersebut sebesar Rp. 2.3 milyar untuk 3.750 pedagang bermitra dengan 27 BMT.

Sedangkan tahun 2005 program PPMUPK bermitra dengan 15 BMT, 63 pasar binaan dengan jumlah 1.571 pedagang.

Monitoring mustahik dana produktif dilakukan untuk memastikan dana ZIS dikelola secara benar dan mampu mengembalikan dana pinjaman kepada BAZIS DKI Jakarta.

4.1.3 Gambaran PDRB Per Kapita DKI Jakarta Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan.

Pendapatan per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Krisis ekonomi yang memuncak pada tahun 1998 sempat mengakibatkan turunnya PDRB per kapita hingga minus 17,02 persen. Namun demikian peningkatan kinerja pada sektor-sektor usaha telah meningkatkan kembali PDRB per kapita DKI Jakarta.

Tabel 4.5

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Kotamadya Tahun 2001 dan 2002 serta IPM 2002.

Kotamadya	PDRB Per Kapita		Pertumbuhan PDRB per kapita (%)	IPM 2002
	2001	2002		
Jakarta Selatan	6.298.078	6.586.645	4,68	75,7
Jakarta Timur	5.007.515	5.131.564	2,48	76,0
Jakarta Pusat	17.444.722	18.758.347	7,53	74,8
Jakarta Barat	5.188.831	5.399.282	4,06	75,0
Jakarta Utara	9.370.128	9.696.403	3,48	75,1

Sumber : BPS DKI Jakarta

Pada tahun 2002 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 15,13 persen yaitu dari Rp. 26,2 juta di tahun 2001 menjadi Rp. 30,2 juta rupiah di tahun 2002. Bila dihitung dengan menggunakan atas dasar harga konstan

akan diketahui pertumbuhan PDRB per kapita secara riil. Pada tahun 2002 PDRB per kapita meningkat sebesar 3,86 persen yaitu dari 7,4 juta rupiah di tahun 2001 menjadi 7,7 juta rupiah di tahun 2002.

UNDP (1996) menyebutkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan seimbang (*balanced*), tidak seimbang (*unbalance*), kuat (*strong*), dan lemah (*weak*). Hubungan dikatakan seimbang jika pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan manusia berlangsung relatif cepat (*strong link*), atau pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan manusia relatif lambat (*weak link*). Sementara kategori tidak seimbang bercirikan pertumbuhan ekonomi relatif cepat tetapi pembangunan manusia relatif lambat.

Tabel 4.5 memperlihatkan beberapa kotamadya DKI Jakarta antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia masuk kategori tidak seimbang seperti wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, sedangkan wilayah Jakarta Pusat masuk dalam kategori seimbang. Diantara lima wilayah DKI Jakarta, Jakarta Timur memiliki nilai IPM paling tinggi yakni 76,0 tetapi pertumbuhannya terendah dibandingkan lainnya hanya 2,48 persen.

Tabel 4.6 memperlihatkan tahun 1987 hingga 1997 PDRB Perkapita harga konstan mengalami peningkatan yang berkelanjutan pada menurunnya jumlah masyarakat miskin di DKI Jakarta. Namun sejak krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan 1997, berpengaruh pada penurunan PDRB perkapita yang meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 860.900 jiwa pada tahun 1998. Sedang di tahun berikutnya jumlah masyarakat miskin menjadi bertambah hingga sekitar lebih kurang 977 ribu orang.

Tabel 4.6

Total KESRA, PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Total Kesra (Ribuan Rp)	PDRB Perkapita Harga Konstan (dalam rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
1987	87.192.204	1.410.009	867.000
1988	62.289.003	1.468.039	779.100
1989	81.636.552	1.573.375	691.200
1990	124.263.342	1.668.447	603.300
1991	92.299.075	1.759.911	567.900
1992	109.324.320	1.874.158	532.500
1993	133.676.733	1.992.092	497.100
1994	173.924.337	6.731.196	408.500
1995	218.903.522	7.343.197	319.900
1996	350.613.757	7.998.277	231.300
1997	289.568.165	8.393.272	181.200
1998	39.310.476	6.914.252	860.900
1999	234.454.602	6.883.322	977.400
2000	307.626.893	7.118.649	284.870
2001	785.591.018	7.376.702	247.500
2002	1.060.055.400	7.661.236	291.300

Sumber : Data Diolah

4.2 Analisis Kuantitatif Model Pengaruh Anggaran Belanja Bidang Kesra, Pendayagunaan Dana ZIS, PDRB Per Kapita Terhadap Tingkat Kemiskinan.

4.2.1 Estimasi Model

Model regresi yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan variabel tingkat kemiskinan, anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita.

Adapun rumusan model regresi yang digunakan untuk menganalisis pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana zis, pdrb per kapita terhadap tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut :

$$\ln TM_t = \alpha + \beta_1 \ln KESRA_{t-1} + \beta_2 \ln ZIS_{t-1} + \beta_3 \ln PDRB_{t-1} + \varepsilon_t \quad (4.1)$$

Dimana :

TM = Tingkat kemiskinan DKI Jakarta

KESRA = anggaran belanja PEMDA DKI Jakarta bidang KESRA

ZIS = pendayagunaan dana ZIS BAZIS DKI Jakarta

PDRB = produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita

Dalam pengolahan data, terkadang tidak langsung memberikan hasil yang terbaik, seperti masih terdapatnya masalah dalam memenuhi asumsi BLUE. Sehingga data harus diolah kembali untuk mendapatkan hasil yang terbaik.

Tabel 4.7
Estimasi Model Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: TINGMIS

Method: Least Squares

Date: 01/08/09 Time: 16:12

Sample: 1987 2002

Included observations: 16

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	75.53101	12.19215	6.195055	0.0000
LN_KESRA	-1.994308	0.573861	-3.475244	0.0046
LN_ZIS	-1.446790	0.799762	-1.809025	0.0956
LN_PDRB	0.953290	0.952416	1.000918	0.3366
R-squared	0.541862	Mean dependent var		6.265625
Adjusted R-squared	0.427327	S.D. dependent var		3.079561
S.E. of regression	2.330462	Akaike info criterion		4.742328
Sum squared resid	65.17263	Schwarz criterion		4.935475
Log likelihood	-33.93862	F-statistic		4.730990
Durbin-Watson stat	1.741083	Prob(F-statistic)		0.021110

Sumber : Data diolah.

Berdasarkan hasil estimasi diatas, diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,43. Angka ini menunjukkan perubahan variasi anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita dapat menjelaskan variasi perubahan tingkat kemiskinan sebesar 43%, adapun sisanya 57% menunjukkan tingkat kemiskinan masih dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Nilai adjusted R^2 pada penelitian ini relatif kecil karena series data yang digunakan pendek.

Nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,74, setelah dilakukan test *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM* didapat nilai probabilitas F-stat (0,587049) dari $\alpha = 5\%$

maka H_0 tidak di tolak (tidak cukup data untuk menolak H_0), artinya tidak ada autokorelasi dalam model diatas.

Tabel 4.8

Test Breusch-Godfrey Serial Correlation LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.356651	Probability	0.708571
Obs*R-squared	1.065295	Probability	0.587049

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/08/09 Time: 16:15

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.764772	20.06252	-0.137808	0.8931
LN_KESRA	0.333120	1.133147	0.293978	0.7748
LN_ZIS	-0.286926	1.996871	-0.143688	0.8886
LN_PDRB	0.032358	2.117347	0.015252	0.9881
RESID(-1)	0.099398	0.318626	0.311958	0.7615
RESID(-2)	-0.274740	0.350999	-0.782736	0.4519
R-squared	0.066581	Mean dependent var	-4.59E-15	
Durbin-Watson stat	1.823786	Prob(F-statistic)	0.977887	

Selanjutnya untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastis, salah satunya adalah *Uji White*. Uji White dapat dilihat dari output *Eviews*.

Tabel 4.9
Tes *White Heteroscedasticity*

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.818373	Probability	0.582216
Obs*R-squared	5.647915	Probability	0.463762

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/08/09 Time: 16:15

Sample: 1987 2002

Included observations: 16

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9225.366	11183.24	-0.824928	0.4307
LN_KESRA	286.3670	234.4133	1.221633	0.2529
LN_KESRA^2	-5.570309	4.546011	-1.225318	0.2516
LN_ZIS	-821.4655	747.0674	-1.099587	0.3001
LN_ZIS^2	18.79347	17.05117	1.102181	0.2990
LN_PDRB	1928.977	2130.818	0.905275	0.3889
LN_PDRB^2	-63.93762	70.59229	-0.905730	0.3887
R-squared	0.352995	Mean dependent var		4.073289
Adjusted R-squared	-0.078342	S.D. dependent var		10.15055
S.E. of regression	10.54067	Akaike info criterion		7.847994
Sum squared resid	999.9507	Schwarz criterion		8.186002
Log likelihood	-55.78395	F-statistic		0.818373
Durbin-Watson stat	2.251305	Prob(F-statistic)		0.582216

Sumber : Data diolah.

Nilai obs*R-squared pada hasil di atas adalah (5.647915) dan nilai probabilitasnya adalah (0,463762) lebih dari $\alpha = 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak mengandung masalah heteroskedastis.

4.2.2 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan pengolahan data pengaruh anggaran belanja kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan, persamaan yang didapat dari hasil estimasi adalah sebagai berikut :

$$\ln TM = 75,53101 + 1,994308 \ln KESRA - 1,446790 \ln ZIS + 0,953290 \ln PDRB$$

$$t\text{-stat} = (6,19) \quad (-3,47) \quad (-1,80) \quad (1,00)$$

$$R^2 = 43\%$$

Tabel 4.10
Koefisien dan Konstanta Model

Variabel	Koefisien	Prob
C	75.53101	0.0000
Ln_KESRA	-1.994308	0.0046
Ln_ZIS	-1.446790	0.0956
Ln_PDRB	0.953290	0.3366

Sumber : Data diolah.

1. Uji-t.

Uji-t merupakan pengujian yang bertujuan untuk mendeteksi signifikansi pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat yang digunakan.

a. Pengujian Hipotesis Variabel KESRA (anggaran belanja bidang kesra).

Pada tabel terlihat bahwa nilai $|t|$ menunjukkan angka 3,47, jauh lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,201, maka H_0 ditolak. Artinya variabel KESRA secara individu mampu mempengaruhi variabel Pendmis (tingkat kemiskinan) secara signifikan. Pada tabel terlihat bahwa koefisien untuk variabel KESRA sebesar -1.994308. Artinya setiap ada kenaikan 10% anggaran pembangunan bidang kesra, maka akan menurunkan kemiskinan sebesar 19 satuan.

b. Pengujian Hipotesis Variabel zis. (pendayagunaan dana ZIS)

Nilai $|t|$ variabel d_zis adalah sebesar 1,80 jauh lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,201. Maka H_0 diterima, artinya variabel ZIS secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien ZIS sebesar -1,446790, mengindikasikan bahwa ketika ada kenaikan dana pendayagunaan ZIS sebesar 10% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 14 satuan.

c. Pengujian Hipotesis PDRB per kapita.

Nilai $|t|$ variabel PDRB menunjukkan angka 1,00 yang jauh lebih kecil dari 2,201, berarti PDRB secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Terlihat koefisien PDRB yang hanya sebesar 0.953290.

2. Uji F.

Uji-F merupakan suatu pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yang digunakan. Adapun langkah-langkah uji-F adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan Hipotesis

$H_0: \alpha = 0$, artinya anggaran pengeluaran bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel tingkat kemiskinan.

$H_0: \alpha \neq 0$, artinya anggaran pengeluaran bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel tingkat kemiskinan.

2. Menentukan tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% dan *degree of freedom* (df) = $n-k$ dalam menentukan t-tabel.
3. Menghitung F-hitung. Hasilnya adalah 4,297. Sementara F tabel sebesar 3,36.
4. Menetapkan kriteria pengujian.

Ho ditolak apabila: $F\text{-hit} > F\text{-tabel}$

Ho diterima apabila: $F\text{-hit} < F\text{-tabel}$

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa nilai F menunjukkan sebesar 4,7 jauh lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,36, maka H_0 ditolak.

5. Kesimpulan yang didasarkan pada hasil ketiga langkah di atas.

Kesimpulannya, ketiga variabel bebas, anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita, secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi dari tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

4.2.3 Interpretasi dan Analisis Model

a. Analisis Pengaruh Anggaran Belanja Bidang KESRA Terhadap Tingkat Kemiskinan.

Berdasarkan hasil estimasi model, nilai koefisien slope variabel anggaran belanja bidang kesra adalah sebesar (-1,994308), yang berarti bahwa semakin tinggi anggaran belanja bidang kesra maka semakin menurun jumlah penduduk miskin. Setiap kenaikan anggaran kesra 10% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 19,94%.

Dari hasil uji t diketahui nilai sig (t) sebesar 0.0046, lebih kecil dari $\alpha=5\%$ menunjukkan bahwa pengaruh KESRA terhadap tingkat kemiskinan secara statistik signifikan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil Brata (2005) yang menunjukkan bahwa variabel pengeluaran sosial berupa anggaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan memberikan manfaat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Penelitian Fan (2000) juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan mempunyai dampak dalam pengurangan kemiskinan. Hasil penelitian Chemingui (2007) juga menunjukkan bahwa pengeluaran publik di sektor pendidikan dan kesehatan ternyata mampu meningkatkan *Total Faktor Productivity* (TFP) untuk semua sektor. Perbaikan dalam TFP akan mempengaruhi keseluruhan ekonomi, dan terutama dalam level kemiskinan.

Widiastuti (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan dari uji *indirect effect* bahwa penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0,002 terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. Sutikno (2000) juga menyimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan, dalam hal ini ditandai dengan penurunan jumlah penduduk miskin.

Konsep tersebut sesuai dengan sistem ekonomi Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunah, dimana pemerintah diharapkan memaksimalkan sumber penerimaan negara yang tidak membebani umat. Semakin besar anggaran penerimaan negara maka semakin besar pula dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat.

Penyusunan anggaran yang efisien dan tepat sasaran sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor ekonomi lainnya. Kontribusinya tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan menciptakan stabilitas ekonomi.

Tabel 4.11

Anggaran Belanja Bidang Kesra dan Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta

Tahun	Total Kesra (Ribuan Rp)	Perubahan Kesra (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Pertumbuhan Penduduk Miskin (%)
1987	87.192.204	-	867.000	10,20
1988	62.289.003	(28,56)	779.100	9,39
1989	81.636.552	31,06	691.200	8,58
1990	124.263.342	52,2	603.300	7,79
1991	92.299.075	(25,72)	567.900	7,07
1992	109.324.320	18,44	532.500	6,35
1993	133.676.733	22,27	497.100	5,65
1994	173.924.337	30,11	408.500	4,59
1995	218.903.522	25,86	319.900	3,55
1996	350.613.757	60,17	231.300	2,48
1997	289.568.165	(17,41)	181.200	1,94
1998	39.310.476	(86,4)	860.900	8,95
1999	234.454.602	496,4	977.400	10,27
2000	307.626.893	31,21	284.870	3,40
2001	785.591.018	155,37	247.500	2,95
2002	1.060.055.400	134,94	291.300	3,48

Sumber: Diolah dari data BPS

Tabel 4.11 memperlihatkan bahwa sejak tahun 1994 hingga 1996 kecenderungan penurunan tingkat kemiskinan seiring dengan perubahan jumlah anggaran bidang kesra yang mengalami kenaikan dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 1994, kenaikan anggaran bidang kesra sebesar 30,11 persen dengan total Rp. 173.924.337.000 menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin hanya sebesar 4,59 persen atau 408.500 jiwa. Sedangkan pada tahun 1995, kenaikan anggaran bidang kesra sebesar 25,86 persen dengan total Rp. 218.903.522.000 menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin menurun

dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,55 persen atau 319.000 jiwa. Fakta berbeda terjadi pada tahun 1996, kenaikan anggaran bidang kesra sebesar 60,17 persen dengan total Rp. 350.613.757.000 menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin menurun dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 2,48 persen atau 231.300 jiwa.

Krisis ekonomi tahun 1997 dan instabilitas politik dalam negeri pada tahun 1998, dimana banyak terjadi demonstrasi yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional, menjadikan anggaran bidang kesra mengalami dampak negatif. Anggaran bidang kesra tahun 1997 mengalami penurunan sebesar 17,41 persen atau jumlah anggaran sebesar Rp. 289.568.165.000. Akibatnya penduduk miskin tahun 1997 berjumlah 181.200 jiwa. Akan tetapi pada tahun 1998 penurunan jumlah anggaran kesra sebesar 86,4 persen atau dengan nilai anggaran Rp. 39.310.476.000 menyebabkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 8,95 persen dengan total sebesar 860.900 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk miskin terus berlanjut hingga tahun 1999 yakni sebesar 977.400 jiwa atau mengalami kenaikan 10,27 persen, meski jumlah anggaran bidang kesra mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya hingga Rp. 234.454.602.000 atau mengalami kenaikan anggaran sebesar 496,4 persen.

Memasuki tahun 2000 hingga 2002, kecenderungan anggaran bidang kesra mengalami kenaikan diiringi dengan penurunan pertumbuhan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2000, jumlah anggaran bidang kesra mencapai Rp. 307.626.893.000 atau mengalami kenaikan 31,21 persen menyebabkan jumlah penduduk miskin hanya 284.870 jiwa atau mengalami pertumbuhan 3,40 persen. Sementara pada tahun 2002, jumlah anggaran bidang kesra mencapai Rp. 1.060.055.400.000 atau mengalami peningkatan 34,94 persen menyebabkan jumlah penduduk miskin 291.300 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,48 persen.

Berdasarkan analisis ekonometrika dan data di atas, cukup menggambarkan hubungan negatif antara kenaikan jumlah anggaran bidang kesra dengan trend jumlah penduduk miskin DKI Jakarta yang mengalami penurunan setiap tahunnya sepanjang 16 tahun pengamatan. Sehingga dapat disimpulkan

sementara bahwa kenaikan jumlah anggaran bidang kesra dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

b. Analisis Pengaruh Analisis Pengaruh Pendayagunaan Dana ZIS Terhadap Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta.

Nilai koefisien variabel pendayagunaan dana ZIS yang didapat dari hasil estimasi adalah sebesar (-1,446790), yang berarti ada pengaruh negatif pendayagunaan dana ZIS terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian jika terjadi peningkatan jumlah pendayagunaan dana ZIS akan mengurangi tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan pendayagunaan dana ZIS sebesar 10 % akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 14,46%.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengaruh zakat secara individu terhadap kemiskinan signifikan pada $\alpha = 10\%$, dimana nilai sig (t) sebesar 0.0956 lebih besar dari 0,10.

Koefisien slope sudah sesuai teori, yakni negatif. Artinya, ketika pendayagunaan dana ZIS meningkat, maka jumlah penduduk miskin akan menurun.

Menurut Qardhawi (2006) salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah dengan menunaikan kewajiban zakat. Kewajiban zakat memiliki kedudukan yang sama dengan kewajiban menunaikan shalat, karena itulah dalam banyak ayat dan hadits, perintah shalat dirangkai dengan perintah zakat, misalnya dalam firman Allah "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'*" (QS. 2:43).

Karena zakat merupakan upaya mengatasi kemiskinan, maka sedapat mungkin dana zakat itu tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif bagi fakir dan miskin kecuali kalau zakat fitrah, karena kalau demikian dikhawatirkan mereka hanya menggantungkan harapannya dari zakat yang membuat mereka tambah malas untuk berusaha, maka dana zakat dapat saja digunakan untuk biaya pendidikan (beasiswa), modal usaha dan sebagainya. Meskipun demikian, kebutuhan awal untuk makan tetap harus dipenuhi, apalagi bagi mereka yang berpenyakit menahun, cacat, dan sebagainya.

Bagi yang tidak menunaikan zakat, bukan hanya tidak sempurna keimanannya tetapi juga termasuk orang yang tidak beruntung, tidak baik dan tidak menunjukkan kebajikan dan ketakwaan, sama saja dengan orang-orang musyrik, tidak memperoleh rahmat Allah, bahkan tidak berhak memperoleh pertolongan-Nya.

Kebijakan Pendayagunaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur adalah sebagai berikut:

1. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh amil zakat seluruhnya didayagunakan / dikembalikan kepada mustahiq sesuai dengan tuntunan syariat Islam yaitu kepada 8 ashnaf, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghairmin, sabilillah dan ibnu sabil.
2. Infaq dan shadaqah serta amal sosial yang berhasil dikumpulkan oleh seluruhnya didayagunakan untuk bantuan kegiatan kemaslahatan umat.

Maka arah kebijakan pendayagunaan agar diprioritaskan pada program yang bersifat produktif yakni pendayagunaan ZIS diarahkan untuk pembangunan investasi jangka panjang dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (bantuan biaya pendidikan), bantuan bagi kaum dhuafa, bantuan penanggulangan bencana alam, pembangunan dan takmir lembaga keagamaan, bantuan kemanusiaan, bantuan guru ngaji/merbot, guru honorer madrasah dan pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa.

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa jumlah pendayagunaan dana ZIS selalu mengalami peningkatan terus menerus selama periode pengamatan. Dimulai tahun 1987 sebesar Rp. 865 juta, kemudian pada tahun 1997 meningkat menjadi Rp. 10.967 juta. Sedangkan pada tahun 2002, jumlahnya mencapai 11.554 juta.

Tabel 4.12
Jumlah Dana ZIS dan Jumlah Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Pendayagunaan Dana ZIS (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
1987	Rp. 865 juta	867.000
1988	Rp. 884 juta	779.100
1989	Rp. 1.235 juta	691.200
1990	Rp. 1.838 juta	603.300
1991	Rp. 2.960 juta	567.900
1992	Rp. 3.250 juta	532.500
1993	Rp. 4.352 juta	497.100
1994	Rp. 6.759 juta	408.500
1995	Rp. 6.576 juta	319.900
1996	Rp. 8.944 juta	231.300
1997	Rp. 10.967 juta	181.200
1998	Rp. 6.762 juta	860.900
1999	Rp. 8.122 juta	977.400
2000	Rp. 8.416 juta	284.870
2001	Rp. 9.482 juta	247.500
2002	Rp. 11.554 juta	291.300

Sumber : Data diolah

Kalau melihat Tabel 4.12, mulai tahun 1987 sampai tahun 1997 terjadi konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin. Baru kemudian pada tahun 1998 dan 1999 angka kemiskinan mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini disebabkan karena kondisi Indonesia yang diterpa krisis ekonomi kemudian diikuti krisis multidimensi Indonesia.

Tahun 2000, dimana kondisi Indonesia sudah membaik, angka kemiskinan mulai mengalami penurunan. Angka kemiskinan tahun 2000 sebanyak 284.870 jiwa, turun drastis dibandingkan tahun 1999 yang berjumlah 977.400 jiwa.

Hubungan yang negatif antara pendayagunaan dana ZIS dan tingkat kemiskinan ini sudah sesuai dengan teori. Semakin besar pendayagunaan dana

ZIS, maka akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin menurun. Hal ini sejalan dengan para ekonom muslim, diantaranya Qardhawi dan Kafh, yang menyatakan bahwa pendayagunaan dana ZIS yang efisien dapat membantu para mustahik terutama fakir miskin untuk keluar dari kondisi miskin. Dana ZIS juga dapat dijadikan sistem jaminan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Qardawi (2005) lebih lanjut menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan bekerja, jaminan sanak famili yang mampu secara ekonomi, dan zakat.

c. Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta.

Nilai koefisien variabel PDRB per kapita yang didapat dari hasil estimasi adalah sebesar (0,953290), yang berarti ada pengaruh positif PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain jika terjadi peningkatan PDRB per kapita akan mengurangi tingkat kemiskinan. setiap kenaikan anggaran PDRB sebesar 10% akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 95%.

Dari hasil uji t diketahui nilai sig.(t) sebesar 0,1906 lebih besar dari 0,05, maka $H_0: \beta_3 = 0$ gagal ditolak, yang berarti bahwa PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan sehingga hipotesis $H_0 \neq \beta_3 = 0$ yang menyatakan bahwa ada pengaruh PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin tidak terbukti.

Hal ini sesuai dengan teori kemiskinan Todaro (2004), yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan disuatu negara tergantung pada dua faktor utama, yakni: (1) tingkat pendapatan nasional rata-rata, dan (2) lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Jelas bahwa, setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatannya tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, semerata apapun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat pendapatan nasional rata-ratanya rendah, maka kemiskinan juga akan semakin meluas.

Tabel 4.13
PDRB per kapita, Gini Rasio, dan Jumlah Penduduk Miskin
DKI Jakarta Tahun 1997 – 2006

Tahun	Gini Rasio	PDRB Per Kapita	Jumlah Penduduk Miskin
1997	0,344	8.393.272	181.200
1998	0,3319	6.914.252	860.900
1999	0,317	6.883.322	977.400
2000	0,351	7.118.649	284.870
2001	0,311	7.376.702	247.500
2002	0,3890	7.661.236	291.300

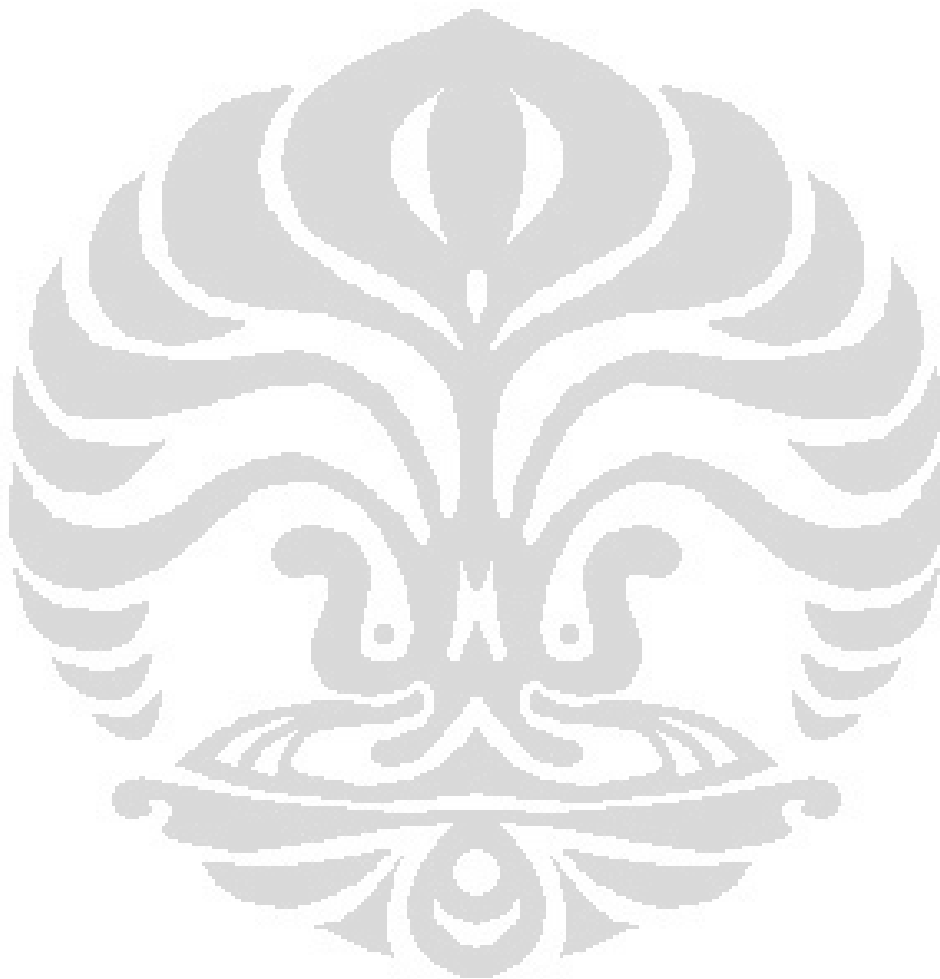
Sumber : BPS DKI Jakarta (Data diolah)

Pada tahun 2002 peningkatan PDRB per kapita diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. PDRB per kapita meningkat dari 7.376.702 pada tahun 2001 menjadi 7.661.236 pada tahun 2002 dan iringi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin dari 247.500 pada tahun 2001 menjadi 291.300 pada tahun 2002.

Hal tersebut membuktikan bahwa tingginya PDRB per kapita tidak berkorelasi dengan tingkat kemiskinan. PDRB per kapita tidaklah identik dengan pengurangan angka kemiskinan. Angka – angka PDRB per kapita ini tidak menunjukkan bagaimana kenyataannya pendapatan daerah dibagikan. PDRB per kapita yang tinggi bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah besar, maka mungkin saja ada suatu daerah yang memiliki PDRB yang tinggi mempunyai jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan suatu daerah yang mempunyai PDRB per kapita lebih rendah.

Ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh nilai gini rasio mengalami peningkatan dari Tabel diatas menunjukkan ketimpangan pendapatan yang meningkat 0,311 pada tahun 2001 menjadi 0,3890 tahun 2002. Masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan harus menjadi perhatian karena

ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi akan menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin parah.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh anggaran belanja bidang kesra, pendayagunaan dana ZIS, dan PDRB per kapita terhadap tingkat kemiskinan, studi kasus di Jakarta pada periode tahun 1987 sampai dengan tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa :

1. Performa anggaran bidang kesra mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata perkembangan jumlah anggaran bidang kesra selama periode pengamatan mengalami peningkatan sebesar 53,33 persen tiap tahunnya lebih besar dibanding rata-rata perubahan jumlah anggaran belanja pembangunan dan rutin yang meningkat hanya 28,25 persen pertahun. Pendayagunaan dana ZIS untuk modal usaha produktif, membina pemanfaatan dana untuk meningkatkan usaha, dan mengurus pengembalian dana produktif. Kegiatan bidang bina usaha produktif telah menyalurkan dana kepada 1.553 orang dengan jumlah dana sebesar Rp. 1,9 milyar. Sementara tahun 2004 dan 2005 disalurkan kepada 19.458 orang dan 213 orang. Disalurkan melalui kecamatan, kelurahan, dan unit kerja dengan pola *qardhul hasan*, baik perorangan, kelompok usaha, maupun karyawan. Pada tahun 2002 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 15,13 persen yaitu dari Rp. 26,2 juta di tahun 2001 menjadi Rp. 30,2 juta rupiah di tahun 2002. Bila dihitung dengan menggunakan atas dasar harga konstan akan diketahui pertumbuhan PDRB per kapita secara riil. Pada tahun 2002 PDRB per kapita meningkat sebesar 3,86 persen yaitu dari 7,4 juta rupiah di tahun 2001 menjadi 7,7 juta rupiah di tahun 2002.
2. Anggaran belanja bidang kesra memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, ini dapat dilihat dari koefisien sloope yang bertanda negatif yang menunjukkan bahwa semakin tinggi anggaran belanja bidang kesra akan menurunkan tingkat kemiskinan. Demikian juga Pendayagunaan Dana ZIS memiliki pengaruh terhadap

tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, dengan koefisien sloope yang negatif berarti bahwa semakin besar pendayagunaan dana ZIS maka tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. Sedangkan variabel PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

5.2. Saran

Beberapa saran berdasarkan penelitian ini adalah :

1. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan agar membantu peningkatan peran serta BAZIS DKI Jakarta dalam tugasnya menyalurkan dana ZIS ke masyarakat. Hal ini karena ZIS terbukti mampu mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Pemerintah Daerah DKI Jakarta agar tetap mempertahankan perfoma anggaran bidang kesra yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dengan selalu menaikkan anggaran belanja khususnya bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Pendayagunaan dana ZIS memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan, maka anggaran pendayagunaan dana ZIS selalu ditingkatkan dan difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat miskin. PDRB memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan yang menunjukkan bahwa peningkatan PDRB akan mengurangi tingkat kemiskinan, maka pemerintah daerah DKI diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah agar terjadi peningkatan PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits

Ahmed, Habib. 2004. *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah. IRTI-IDB.

Akram Khan, Muhammad. 1997. *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan Tentang Ekonomi)*. Jakarta. PT Bank Muamalat Indonesia dan Institute of Policy Studies Islamabad.

Alawi, Nadhif. 2006. *Pengaruh Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Terhadap Kemiskinan Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002-2004*. Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Download 12 Agustus 2008.

<http://www.digilib.ui.edu/file?file=digital/88286-T%2017132a.pdf>

Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. *Penduduk Provinsi DKI Jakarta : Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2001. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1998/1999 – 1999/2000*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2007. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi 2003 - 2006*. Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. 2007. *Kinerja Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2002-2007*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. 2007. *Potret Sosial dan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2006*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DKI Jakarta. *Jakarta Dalam Angka (JDA) 2000 s/d 2007*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. 2006. *Evaluasi Keadaan Rumah tangga Miskin di DKI Jakarta 2005*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. 2003. *Statistik Jakarta 2002*, Jakarta.

- BAZIS Provinsi DKI Jakarta. *Laporan Program Kerja Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005*. Jakarta.
- Budi Soeradji dan Mubyarto (Editor), 1998, *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan: Laporan Penelitian di Daerah-daerah*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Cherningui, Mohamed Abdelbasset. 2007. *Public Spending and Poverty Reduction in an Oil-Based Economy: The Case of Yemen*. IFPRI Discussion Paper No. 00701.
- Daud Ali, Mohammad. 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Djailani, "Strategi Bazis dalam Menyiasati Implementasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", dalam Muhtar Sadli (Editor), 2003, *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, Jakarta, Forum Zakat.
- Doa, Djamal. 2001. *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta: Pengumpulan Zakat Dengan Sistem Administrasi Perpajakan, Menghindari Pungutan Double Pajak Dan Zakat*. Jakarta. Yayasan Nuansa Madani.
- Ghozali, Imam. 2006. *Analisis multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huda, Nurul, et al. 2008. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Islahi, Abdul Azim, 1997, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Terj)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Jamaluddin, Ade. 2008. *Keluar dari Belenggu Kemiskinan*. Opini pada *Koran Sindo* edisi Selasa, 14 Oktober 2008.
- Jusmaliani, dan M. Sukarni (Editor), 2005, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1999. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta. BPFE.

- Metwally, M.M. 1995. *Teori dan model Ekonomi Islam*. Jakarta. PT Bangkit Daya Insana.
- Muhit, Abdul (Editor), 2006, *Manajemen ZIS BAZIS Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta, BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
- Muhit, Abdul (Editor), 2006, *Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta*, Jakarta, BAZIS Provinsi DKI Jakarta.
- Mulyaningsih, Yani. 2008. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Pembangunan Manusia dan Kemiskinan*. Tesis PSTTI Universitas Indonesia, Kekhususan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Nova Andika, Mohammad. 2004. *Pengaruh Anggaran Belanja Pemerintah Daerah DKI Jakarta terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Kota*. Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Download 12 Agustus 2008.
<http://www.digilib.ui.edu/file?file=digital/files/disk1/171/jkptuipp-gdl-s2-2004-mohammadno-8546-t13231a.pdf>.
- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf, 2005, *Dauru Al-Zakat: fi'ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishadiyah*, Edisi Indonesia, *Spekturm Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta, Zikrul Hakim.
- , 2002. *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta. Mitra Pustaka.
- Riduansyah, Mohammad. 2000. *Kontribusi Penerimaan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Kaitan Pembiayaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Pemerintah DKI Jakarta)*. Jakarta. Pusat Pengembangan Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.
- Riduwan, dan E. A. Kuncoro. 2007. *Cara menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung. Alfabeta.
- Sabiq, Sayid. 2007. *Fiqh As-Sunnah*. Kairo. Al-Fath lil-I'lam Al-'Arabi.

- Simamora, Joni. 2008. *Alokasi Anggaran Dalam Sektor Kesejahteraan Sosial Pada APBD Tahun 2003-2004 di Kabupaten Lahat*. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Swasono, Sri-Edi, Al Muzammil dan Amri Yusro (Peny), 1987, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: dari Cendekiawan kita tentang Islam*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suparlan, Parsudi, *Pelayanan Sosial Perkotaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Makalah Diklat Manajemen Perkotaan Tahun 1999/2000.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*, Jakarta: IMPAC.
- Suparlan, Parsudi, 1993, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Strahm, Rudolf H. 1999. *Kemiskinan Dunia Ketiga: Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*, Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta. Penerbit Ekonosia.
- Winarno, Wing Wahyu. 2007. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Yusoff, Mohammed. 2004. *Fiscal Policy in An Islamic Economy and The Role of Zakat*. Makalah dari "International Seminar on Macroeconomics From an Islamic Perspectives: Theory and Contemporary Issues". September, 22-24, 2004. Renaissance Hotel. Malaysia.
- Yusrizal, Muhammad, 2002, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus Yayasan Dompot Dhuafa Republika)*, Tesis Program Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia.

Data-data Bahan untuk Estimasi Regresi Linear Berganda

TM	KESRA	ZIS	PDRB	ln kesra	ln zis	ln pdrb
10.57	87192204000	865191669	1410009	25.19	20.58	14.16
9.23	62289003000	884881989	1468039	24.86	20.6	14.2
7.96	81636552000	1235069469	1572375	25.13	20.93	14.27
7.33	124263342000	1838764007	1668447	25.55	21.33	14.33
6.92	92299075000	2960932835	1759911	25.25	21.81	14.38
6.48	109324320000	3250004661	1874158	25.42	21.9	14.44
6.04	133676733000	4352241133	1992092	25.62	22.19	14.5
4.96	173924337000	6759484973	6731196	25.88	22.63	15.72
3.87	218903522000	6576617111	7343197	26.11	22.61	15.81
2.80	350613757000	8944357930	7998277	26.58	22.91	15.89
2.19	289568165000	10967480548	8393272	26.39	23.12	15.94
10.37	39310476000	6762772558	6914252	24.39	22.63	15.75
11.76	234454602000	8122693568	6883322	26.18	22.82	15.74
3.40	307626893000	8416626931	7118649	26.45	22.85	15.78
2.94	785591018000	9482194345	7376702	27.39	22.97	15.81
3.43	1060055400000	11554727015	7661236	27.69	23.17	15.85

Lampiran 2 : Estimasi Model Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: TINGMIS

Method: Least Squares

Date: 01/08/09 Time: 16:12

Sample: 1987 2002

Included observations: 16

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	75.53101	12.19215	6.195055	0.0000
LN_KESRA	-1.994308	0.573861	-3.475244	0.0046
LN_ZIS	-1.446790	0.799762	-1.809025	0.0956
LN_PDRB	0.953290	0.952416	1.000918	0.3366
R-squared	0.541862	Mean dependent var		6.265625
Adjusted R-squared	0.427327	S.D. dependent var		3.079561
S.E. of regression	2.330462	Akaike info criterion		4.742328
Sum squared resid	65.17263	Schwarz criterion		4.935475
Log likelihood	-33.93862	F-statistic		4.730990
Durbin-Watson stat	1.741083	Prob(F-statistic)		0.021110

Lampiran 3 : Tes *White Heteroscedasticity*

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.818373	Probability	0.582216
Obs*R-squared	5.647915	Probability	0.463762

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/08/09 Time: 16:15

Sample: 1987 2002

Included observations: 16

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-9225.366	11183.24	-0.824928	0.4307
LN_KESRA	286.3670	234.4133	1.221633	0.2529
LN_KESRA^2	-5.570309	4.546011	-1.225318	0.2516
LN_ZIS	-821.4655	747.0674	-1.099587	0.3001
LN_ZIS^2	18.79347	17.05117	1.102181	0.2990
LN_PDRB	1928.977	2130.818	0.905275	0.3889
LN_PDRB^2	-63.93752	70.59229	-0.905730	0.3887
R-squared	0.352995	Mean dependent var		4.073289
Adjusted R-squared	-0.078342	S.D. dependent var		10.15055
S.E. of regression	10.54067	Akaike info criterion		7.847994
Sum squared resid	999.9507	Schwarz criterion		8.186002
Log likelihood	-55.78395	F-statistic		0.818373
Durbin-Watson stat	2.251305	Prob(F-statistic)		0.582216

Lampiran 4 : Tes *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM*

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F-statistic	0.356651	Probability	0.708571
Obs*R-squared	1.065295	Probability	0.587049

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/08/09 Time: 16:15

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.764772	20.06252	-0.137808	0.8931
LN_KESRA	0.333120	1.133147	0.293978	0.7748
LN_ZIS	-0.286926	1.996871	-0.143688	0.8886
LN_PDRB	0.032358	2.117347	0.015282	0.9881
RESID(-1)	0.099398	0.318626	0.311958	0.7615
RESID(-2)	-0.274740	0.350999	-0.782736	0.4519
R-squared	0.066581	Mean dependent var		-4.59E-15
Adjusted R-squared	-0.400129	S.D. dependent var		2.084428
S.E. of regression	2.466442	Akaike info criterion		4.923427
Sum squared resid	60.83337	Schwarz criterion		5.213148
Log likelihood	-33.38741	F-statistic		0.142660
Durbin-Watson stat	1.823786	Prob(F-statistic)		0.977887

Lampiran 5 : Correlation Test

	KESRA	PDRB	ZIS
KESRA	1	0.58903041021	0.730601145933
PDRB	0.58903041021	1	0.947712995176
ZIS	0.730601145933	0.947712995176	1

